

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH MALUKU
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
NOMOR KEP-63/WBC.19/2020
TENTANG
DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku perlu menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku tentang Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Menetapkan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Kertas Kerja;
3. Kerangka Kelembagaan;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
5. Kesimpulan; dan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta Matriks Kinerja dan Pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Serta Analisa SWOT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Peta Strategi Kanwil DJBC Maluku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Maluku Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

juga menjadi dokumen acuan dalam rangka pelaksanaan manajemen transformasi yang dilaksanakan di lingkungan Kanwil DJBC Maluku dalam periode tahun 2020-2024.

- KELIMA** : Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.
- KEENAM** : Bidang Kepatuhan Internal selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Kepala Kanwil DJBC Maluku.
- KETUJUJUH** : Kepala Kanwil DJBC Maluku bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Strategis kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN** : Arah Kebijakan dan Strategi dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Maluku Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijabarkan lebih lanjut dalam Kertas Kerja Kanwil DJBC Maluku Tahun 2020-2024 yang bersifat indikatif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku.

Ditetapkan di Maluku

Pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU



ERWIN SITUMORANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
NOMOR KEP-63/WBC.19/2020
TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS
KANWIL DJBC MALUKU
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Maluku yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJBC Maluku periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai.

Selain capaian-capaian yang diraih DJBC, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi DJBC terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada DJBC akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir.

Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang. Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance, dan Revenue Collector*. Potensi dan permasalahan DJBC yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1. Kondisi Umum

Dalam Renstra Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat (MPPB) Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Mulai tahun 2017 Kanwil MPPB di kembangkan menjadi dua kanwil yaitu Kanwil DJBC Maluku dan Kanwil DJBC Papua.

Dalam renstra Kanwil MPPB 2016-2019 tersebut pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut. Selaras dengan Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC MPPB telah menyusun Sasaran Strategis dan Program kantor wilayah lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi DJBC yang

menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

1.1.1. Capaian Tahun 2015-2019

a. Capaian Penerimaan Kepabebean dan Cukai

Bidang Kepabebean dan Cukai memiliki Sasaran Strategis (SS) berupa Penerimaan Negara di Sektor Kepabebean dan Cukai yang optimal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai. IKU ini digunakan sebagai ukuran terhadap Penerimaan di Sektor Kepabebean dan Cukai. Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Sedangkan yang dimaksud dengan Realisasi Penerimaan adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Kalkulasi terhadap indikator ini diukur dengan cara menghitung persentase terhadap jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan terhadap target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun.

Realisasi terhadap target penerimaan di sektor kepabebean dan cukai dari kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

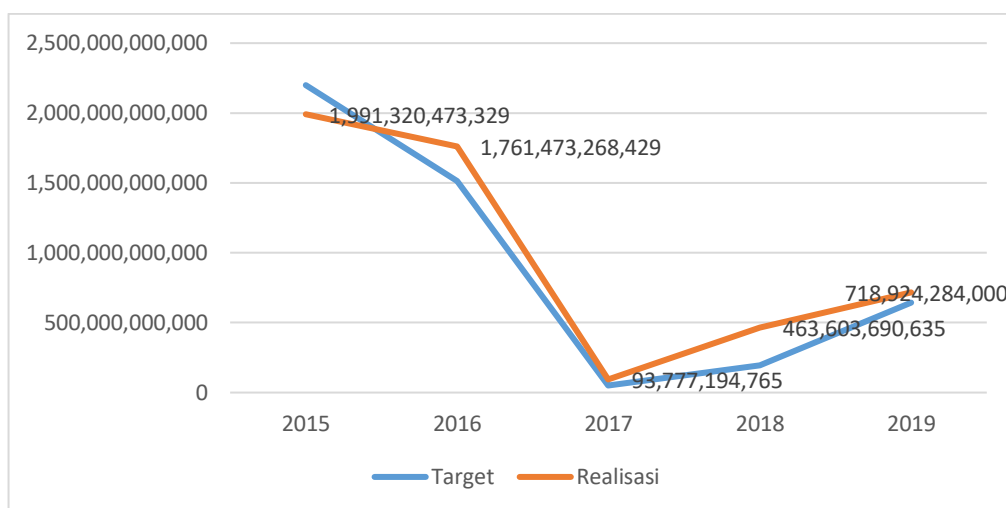
Tabel 1
Realisasi Penerimaan

No.	Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2015	2.199.389.724.000	1.991.320.473.329	90,54%
2	2016	1.512.397.124.000	1.761.473.268.429	116,47%
3	2017 (Kanwil MPPB)	451.890.000.000	1.133.187.002.070	250,77%
	2017 (Kanwil Maluku)	50.404.348.000	93.777.194.765	186,05%
4	2018	194.400.915.000	463.603.690.635	238,48%
5	2019	642.671.000.000	718.924.284.000	111,87%

Perlu diketahui bahwa Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat mengalami pemekaran pada bulan Oktober 2017, yang kemudian menjadi Kanwil Khusus DJBC Papua dan Kanwil DJBC Maluku.

Terhadap tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan di sektor kepabeanaan dan cukai cenderung memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan, namun mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan tersebut dapat tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1
Realiasi Penerimaan



Terhadap realisasi penerimaan tiap tahunnya, dapat dirincikan pula penerimaan di sektor kepabeanaan dan cukai:

Tabel 2
Rincian Penerimaan Tahun 2015

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Bea Masuk	618.955.344.000	510.190.261.329	83%
2	Bea Keluar	1.581.194.380.000	1.480.929.212.000	94%
3	Cukai	-	196.000.000.000	-
Total		2.199.389.724.000	1.991.320.473.329	90,54%

1. Tahun 2015

Terjadi defisit terhadap pemenuhan target penerimaan pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10/PERMENKP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang pada intinya menghentikan usaha perikanan tangkap s.d. 31 Oktober 2015. Dengan berlakunya peraturan tersebut, secara

langsung mempengaruhi kegiatan industry perikanan terutama dalam importasi alat-alat penangkap ikan dan spare parts kapal penangkap ikan;

- b) Importasi yang sebagian besar menggunakan skema FTA yaitu form D, form E, AANZ, dan fasilitas BKPM dengan mendapatkan pembebasan bea masuk;
- c) Secara periodik importasi barang untuk menunjang kegiatan operasional PT. Freeport Indonesia akan dikurangi dan diwajibkan melakukan pembelian barang dalam negeri;
- d) Nilai tukar mata uang (kurs) yang digunakan dalam transaksi ekspor selalu berubah-ubah setiap minggunya yang tentunya sangat mempengaruhi penghitungan bea keluar;
- e) Tingkat permintaan produk konsentrat tembaga di luar negeri secara global sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan;
- f) Harga ekspor produk konsentrat tembaga yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri Keuangan (berdasarkan Harga Patokan Ekspor yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan) bersifat fluktuatif bahkan cenderung menurun;
- g) Penurunan tarif bea keluar dari 7,5% menjadi 5% sejak bulan Agustus 2015 sebagai konsekuensi atas dilaksanakannya pembangunan smelter di Gresik tahap II sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- h) Penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) per 1 Januari 2015 kisaran 2% (dua persen) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar berbanding lurus dengan potensi penurunan penerimaan Bea Keluar sebesar 2% (per tahun);
- i) Penurunan Kadar Konsentrat dari 24,25% menjadi 22,20% berpotensi menyebabkan penurunan Bea Keluar di kisaran 6% (per tahun);
- j) Penjualan konsentrat oleh PT. Freeport Indonesia sebesar 58% ke pasar domestik dari kapasitas produksi berdampak langsung terhadap penerimaan Bea Keluar dari KPPBC Amamapare.

Tabel 3
Rincian Penerimaan Tahun 2016

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Bea Masuk	449.762.347.000	495.882.691.429	110,25%
2	Bea Keluar	1.062.634.777.000	1.265.245.177.000	119,06%
3	Cukai	-	345.400.000	-
Total		1.512.397.124.000	1.761.473.268.429	116,47%

2. Tahun 2016

Terjadi surplus pada pemenuhan target capaian penerimaan Kanwil MPPB pada tahun 2016 sebesar Rp. 249.076.144.429 atau 29,31%. Namun pada pemenuhan target tersebut, terdapat beberapa kendala yaitu :

- a) Adanya penurunan tarif bea keluar dari 7,5% menjadi 5% sejak Agustus 2015 sebagai konsekuensi atas dilaksanakannya pembangunan smelter di Gresik tahap II sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- b) Kondisi iklim atau cuaca di wilayah Amamapare dan Timika, memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemusatan ke sarana pengangkut (kapal), mengingat karakteristik pemasaran produk konsentrat tembaga sesuai pesanan dan transaksi ekspor yang dilakukan antara PT. Freeport Indonesia dengan pihak pembeli (buyer) di luar negeri adalah dalam bentuk kering (dry). Selain itu, kondisi fisik perairan di pelabuhan Amamapare yang sangat rentan terhadap pasang surut air laut, sehingga secara tidak langsung dapat menghambat kegiatan lalu lintas (keluar/ masuk) kapal ke dan dari pelabuhan juga kegiatan pemuatan atau pembongkaran barang;
- c) Masih sering terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja PT. Freeport Indonesia yang secara langsung berdampak pada kegiatan produksi konsentrat tembaga;
- d) Tingkat permintaan produk konsentrat tembaga di luar negeri secara global sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan;
- e) Harga ekspor produk konsentrat tembaga yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri Keuangan (berdasarkan Harga

Patokan Ekspor yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan) bersifat fluktuatif bahkan cenderung menurun.

Tabel 4
Rincian Penerimaan Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Bea Masuk	16.961.483.000	19.255.559.313	113,53%
2	Bea Keluar	333.442.865.000	74.391.235.452	222,44%
3	Cukai	-	130.400.000	-
Total		50.404.348.000	93.777.194.765	186,05%

3. Tahun 2017

Target capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai dapat terpenuhi di tahun 2017, dalam pemenuhannya, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu :

- a) Importasi sebagian besar menggunakan skema Free Trade Agreement yaitu Form D, Form E, AANZ, dan Fasilitas BKPM dengan mendapatkan pembebasan bea masuk;
- b) Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang intinya menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan industri perikanan terutama dalam importasi alat-alat penangkap ikan dan spare parts kapal penangkap ikan.

Tabel 5
Rincian Penerimaan Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Bea Masuk	14.400.915.000	16.927.295.000	117,54%
2	Bea Keluar	180.000.000.000	446.490.995.635	248,05%
3	Cukai	-	185.400.000	-
Total		194.400.690.635	463.603.690.635	238,48%

4. Tahun 2018

Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pemenuhan target penerimaan Kanwil DJBC Maluku pada tahun 2018 yaitu :

- a) Pada Bea Masuk, peningkatan penggunaan fasilitas BKPM dan tarif preferensi (skema *Free Trade Agreement*) yang mendapatkan pembebasan/keringanan bea masuk;
- b) Pada bea keluar, tantangan utamanya adalah permintaan kuota ekspor oleh perusahaan yang tidak seluruhnya dikabulkan oleh Kementerian ESDM dalam rangka mendorong hilirisasi produk nikel, kemudian tantangan yang lain adalah meningkatnya frekuensi gempa bumi dan cuaca ekstrim yang sering terjadi di perairan Maluku dan Maluku Utara yang dapat menghambat eksplorasi dan pengiriman nikel ore ke negara tujuan.

Tabel 6
Rincian Penerimaan Tahun 2019

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Bea Masuk	129.926.000.000	141.275.052.000	108,74%
2	Bea Keluar	512.745.000.000	577.578.431.000	112,64%
3	Cukai	-	70.800.000	-
Total		642.671.000.000	718.924.283.000	111,87%

5. Tahun 2019

Total realisasi penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai dapat melampaui target atas APBN-P yang telah ditetapkan. Dalam pemenuhan target tersebut, ditemui beberapa kendala yaitu :

- a) Frekuensi kegiatan importasi rendah di wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku yang berpotensi mengurangi pencapaian penerimaan Bea Masuk;
- b) Penyelesaian kewajiban importasi dominan diselesaikan di Pelabuhan bongkar impor;
- c) Tidak tersedianya rute kapal interseluler terjadwal dari Pelabuhan bongkar impor ke Pelabuhan wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan estimasi waktu yang tidak terukur;
- d) Kebijakan pemerintah di tahun 2020 melarang ekspor nikel dalam kondisi ore yang berpotensi menghilangkan penerimaan bea keluar;
- e) Tidak terdapat produsen Barang Kena Cukai di wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku sehingga tidak ada potensi penerimaan cukai.

b. Capaian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

Dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, Kanwil DJBC Maluku mengoptimalkan

kegiatan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sedangkan indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJBC Maluku adalah "Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21)". Indikator ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai di lingkungan DJBC. Penghitungan indikator ini diukur dengan menghitung persentase berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan dibandingkan dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan.

Tabel 7
Hasil Penyidikan P-21 tahun 2015 - 2019

Tahun	Target	SPDP	P-21	Capaian Realisasi
2015	60%	1	1	100%
2016	60%	1	1	100%
2017	65%	1	1	100%
2018	70%	1	1	100%
2019	70%	0	0	N/A

Bahwa mulai tahun 2015 - 2019 Kanwil Maluku hanya melakukan penyidikan yang terkait dengan Kepabeanan sebanyak 4 kali sebagaimana tabel diatas. Penyidikan dilakukan gabungan antara penyidik Kanwil Maluku dan KPBC yang terkait. Penyidikan tersebut umumnya menyangkut kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang secara ilegal.

Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) berkas ada tahun 2015, kapal patroli BC9001 melakukan penindakan terhadap kapal penangkap ikan berbendera Filipina di perairan Laut Halmahera.

Tahun 2016 sebanyak 1(satu) berkas penegahan oleh kapal patroli Dit. Polair Polda Papua KP XVII-1023 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di perairan Holtekamp terhadap 1 (satu) unit long boat yang berlayar dari Papua New Guinea tujuan Jayapura yang setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan mengangkut 24 (dua puluh empat) karung berisi kulit kayu jenis masohi dan 6 (enam) karung buah pinang yang berasal dari Papua New Guinea ke dalam Daerah Pabean Indonesia yang tidak memiliki dokumen (manifest) melanggar pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tahun 2017 sebanyak 1(satu) berkas Pada bulan Maret tahun 2017, diawali dari adanya penegahan oleh tim patroli darat KPPBC Tipe Madya Pabean C Jayapura pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 15.45 WIT di Jalan Raya Hamadi terdapat sebuah mobil pick up yang sedang melintasi di Jalan

Raya Hamadi yang setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan mengangkut 21 (dua puluh satu) karung berisi kulit kayu jenis masohi yang berasal dari Papua New Guinea (PNG) yang bongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) berkas pada bulan maret diawali dari adanya penegahan oleh tim patroli darat dan patrol laut Kanwil DJBC Maluku terhadap KLM Surya dharma pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIT di pelabuhan umum Dobo, Kepulauan Aru Provinsi Maluku telah dilakukan penindakan atas terjadinya tindak pidana kepabeanan di bidang impor yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dan/ membongkar barang impor diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yaitu berupa barang bekas (ballpress) yang diduga berasal dari luar daerah pabean

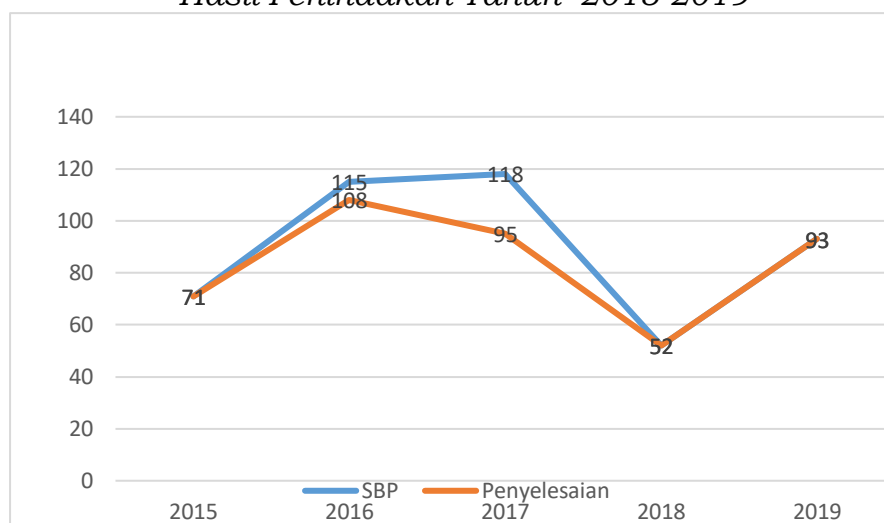
Bahwa kegiatan penyidikan berjalan lancar dan belum ada hambatan yang berarti serta koordinasi aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Penindakan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Target	SBP	Penyelesaian	Capaian Realisasi
2015	80%	71	71	100%
2016	80%	115	108	94%
2017 (Kanwil MPPB)	70%	100	77	77%
2017 (Kanwil Maluku)	50%	18	18	100
2018	90%	52	51	98,08
2019	92%	93	93	100

Grafik 2
Hasil Penindakan Tahun 2015-2019



Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019, kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang terjadi di Kantor Wilayah DJBC Maluku) jumlahnya relatif sedikit sebagaimana tabel di atas. Meskipun jumlahnya relatif sedikit namun mewakili semua aspek pelanggaran yang ada di bidang Kepabeanan dan Cukai. Pelanggaran tersebut meliputi :

1. Pelanggaran di bidang cukai;
2. Pelanggaran di bidang pabean baik impor dan ekspor; dan
3. Pelanggaran di bidang larangan dan pembatasan (lartas).

Patroli laut adalah kegiatan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu waktu dalam rangka pencegahan penyelenggaraan termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Patroli laut yang dimaksud selama tahun 2015-2019 meliputi:

1. Patroli Laut Terkoordinasi
2. Patroli Laut Terpadu
3. Patroli Laut Kerjasama Operasi (KSO)
4. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
5. Patroli Laut Mandiri

Kegiatan patroli laut dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 9
Efektivitas Patroli Laut Tahun 2015-2019

No	Tahun	Ren- cana	Pelak- sanaan	Peme- riksaan	Patroli Laut yang Mengha- silkan Peninda- kan	Penin- dakan berdasa- rkan <i>Tar- getting</i>	% Realis- asi
1	2015	53	54	N/A	N/A	N/A	101,89
2	2016	53	61	N/A	3	N/A	82,04
3	2017 (Kanwil MPPB)	46	36	N/A	3	N/A	71,96
	2017 (Kanwil Maluku)	4	4	N/A	0	N/A	70
4	2018	15	18	N/A	5	N/A	80
5	2019	15	17	16	2	4	76,47

Untuk mengoptimalkan pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor di lingkungan kerja Kanwil DJBC Maluku serta satuan kerja dibawahnya, dibentuk tim pengawasan narkotika (Customs Narcotics Team) Kanwil DJBC Maluku, disahkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Nomor KEP-33/WBC.19/2019 tanggal 4 Maret 2019. Tim Pengawasan Narkotika Kanwil DJBC Maluku beranggotakan Pejabat dan Pelaksana Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku dan Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC di lingkungan kerja Kanwil DJBC Maluku.

Sinergi pengawasan narkotika terus dilaksanakan dengan instansi terkait, salah satunya dengan operasi bersama pengawasan barang kiriman pos oleh Kanwil DJBC Maluku, KPPBC Ambon, BNNP Maluku, Direstnarkoba Polda Maluku dan Ditsabara Polda Maluku pada bulan Februari 2019 serta kegiatan Patroli Laut Bersama oleh KPPBC Ternate, Kanwil DJBC Maluku beserta dengan BNNP Maluku Utara menggunakan Speedboat BC1513 di wilayah perairan Ternate pada bulan April 2019. Operasi sinergi pengawasan NPP juga telah membuahkan hasil yaitu pengungkapan pengiriman narkotika berupa ganja seberat ±2 kg melalui perusahaan jasa pengiriman J&T dan Pada bulan Desember tahun 2019 lalu juga dilaksanakan pengungkapan pengiriman narkotika jenis shabu (*methamphetamine*) seberat 145 gram melalui perusahaan jasa pengiriman TIKI. Kegiatan operasi gabungan dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Maluku, KPPBC TMP C Ternate, bersama dengan BNNP Maluku Utara di kargo bandara Sultan Baabullah Ternate.

Pada tahun 2019 Kanwil Bea dan Cukai Maluku bekerja sama dengan Kejati Maluku melaksanakan pemusnahan barang rampasan negara berupa pakaian bekas eks impor dan narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dimusnahkan serta barang milik negara eks penindakan Kepabeanan dan Cukai hasil operasi pasar peredaran barang kena cukai illegal tahun 2018 dan tahun 2019. Pakaian bekas eks impor yang dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku sebanyak 1.562 ball merupakan hasil penindakan yang dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Maluku pada bulan Mei 2018 lalu terhadap KLM Surya Dharma yang mengangkut pakaian bekas dari Dili, Timor Leste. Pakaian bekas eks impor tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Selain pemusnahan pakaian bekas, ikut dimusnahkan juga barang kena cukai ilegal berupa 145.600 batang rokok dan 246 botol liquid vape dengan perkiraan total nilai barang sekitar Rp. 82.728.000,- dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 63.712.000,- berdasarkan Persetujuan Penghapusan BMN dengan Tindak Lanjut Dimusnahkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon.

c. Capaian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Di bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan fasilitas di bidang fasilitas kepabeanan dan cukai maka Kantor Wilayah DJBC Maluku, mengoptimalkan kegiatan peningkatan ekspor di sektor perikanan di bidang fasilitas kepabeanan dan cukai. Sedangkan indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJBC Maluku adalah Persentase Efektivitas Peningkatan Nilai Ekspor, Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja, Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi, Persentase Efektivitas Kegiatan Kehumasan, Indeks Kualitas Penyampaian Laporan Evaluasi Makro TPB, Indeks Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi, serta Tingkat Efektivitas FGD Kebijakan Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, IKU Bidang Fasilitas Kepabeanan tentang efektifitas peningkatan nilai ekspor pada tahun 2015-2019 sudah sangat baik, dengan cara penghitungan kinerja tersebut dihitung melalui dua komponen, yaitu komponen ekstensifikasi dan intensifikasi. Komponen Ekstensifikasi berbobot 60% yang terdiri dari 60% Komponen Proses, serta 40% Komponen Hasil. Pada

Komponen Proses, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku, seperti Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Sosialisasi terhadap Calon Eksportir Baru, Serta Koordinasi dengan Instansi lain yang dapat mendorong ekspor. Sedangkan dari Komponen Intensifikasi berbobot 40% dari realisasi ekspor tahun berjalan dibagi oleh target eksportir pada tahun tersebut.

Pencapaian IKU Efektivitas Peningkatan Nilai Ekspor pada saat ini sangat baik, hal ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan untuk Bidang Fasilitas pada tahun 2019 sebesar 75% dengan capaian IKU mencapai 108%, yang artinya capaian IKU Efektivitas Peningkatan Nilai Ekspor pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai sudah melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya Devisa Hasil Ekspor di Bidang Perikanan, serta bertambahnya Eksportir Baru setiap tahun.

Kemudian pada IKU Kajian, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai sudah melaksanakan 3 Kajian dengan tema:

1. Kajian terkait Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, dengan nilai Kajian
2. Kajian tentang Kawasan Pabean, mendapat nilai 4 dari target yang ditetapkan sebesar 3
3. Kajian tentang Fasilitas KITE untuk IKM, mendapatkan nilai 3,5 dari target yang ditetapkan sebesar 3

Kegiatan Kehumasan pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terdapat IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi pada Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Maluku bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi pada Bidang Kanwil DJBC Maluku ini sudah sangat baik, dapat dilihat dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan capaian sebesar 118%.

d. Capaian Reformasi: Organisasi, SDM, dan TIK

1. Capaian Reformasi Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu Eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang berskala sangat besar dan mempunyai instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik yang sangat strategis sehingga menjadikan

organisasi DJBC sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator, pengawasan maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan penataan organisasi secara berkesinambungan. Pada tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Maluku secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. 5 Unit Eselon III di Kantor Wilayah: Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Bidang Penindakan dan Penyidikan, dan Bidang Kepatuhan Internal;
- b. 3 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate;
- c. 19 Unit Eselon IV yang tersebar di seluruh Bagian/Bidang.

Sejalan dengan program penataan atau modernisasi organisasi DJBC yang dilakukan dalam kurun waktu 2015 - 2019, pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Maluku telah dilakukan upaya antara lain:

- a. Peningkatan status atau modernisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- b. Peningkatan tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- c. Peningkatan kepercayaan publik dengan pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku telah menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk kegiatan tertentu yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif, dan untuk menjaga agar SOP yang ditetapkan selalu sesuai dengan dinamika organisasi dan tuntutan masyarakat setiap tahun SOP ini terus dievaluasi, dan dilakukan penyempurnaan.

2. Capaian Reformasi Sumber Daya Manusia

Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku menuntut profesionalisme dan integritas dari seluruh aparatur sipil negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem penempatan atau pengembangan yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur.

Untuk menghasilkan SDM yang profesional, Kantor Wilayah DJBC Maluku telah melaksanakan pengelolaan SDM melalui pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku melalui pembelajaran.

Kantor Wilayah DJBC Maluku terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai demi mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Bentuk pengembangan tersebut di antaranya dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai program pembelajaran yang bersifat klasikal seperti pelatihan maupun nonklasikal seperti *e-learning*.

- b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai (P2KP).

Selain melalui pembelajaran klasikal dan *e-learning*, guna mendorong keberanian dan ketrampilan *public speaking* para pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku diwajibkan untuk minimal satu kali dalam setahun untuk tampil sebagai narasumber dalam kegiatan P2KP, Sharing Session dan Bimbingan Teknis.

- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJBC melalui pendidikan.

Kantor Wilayah DJBC Maluku memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mendapatkan pendidikan baik itu melalui izin belajar dengan pembiayaan sendiri maupun tugas belajar dengan biaya negara, biaya oleh instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional, Badan Swasta Nasional/Internasional, atau Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional yang meliputi Program Pendidikan DIII, DIV, S1, S2, dan S3.

- d. Pengembangan sistem informasi pengembangan pegawai.

Untuk mendukung proses pengembangan kompetensi pegawai DJBC telah dikembangkan sistem informasi pengembangan pegawai yang telah terintegrasi dengan Customs Excise Human Resource Information System

(CEHRIS). Dengan integrasi tersebut maka akan didapatkan data yang lebih valid, *reliable*, *accessible* serta *real time*.

3. Capaian Reformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kantor Wilayah DJBC Maluku mendukung arah kebijakan DJBC di bidang Informasi dan Teknologi (IT), dimana untuk periode Tahun 2015- 2019 menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggabungan sistem informasi di setiap unit ke dalam sistem informasi DJBC dalam mewujudkan sistem informasi manajemen terpadu. Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga mengikuti kebijakan integrasi perangkat IT di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Untuk pemanfaatan informasi dan teknologi pada Kantor Wilayah DJBC Maluku guna mendukung kinerja sehari-hari, telah dimanfaatkan sistem aplikasi antara lain:

1. Aplikasi CEISA;
2. Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
3. Aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
4. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
5. Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker);
6. Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara);
7. Aplikasi RKAL, Tukin serta Gaji;
8. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Akuntansi BMN);
9. Aplikasi Pengawasan (Aplikasi Penindakan);
10. Aplikasi SIPUMA (Sistem Pengaduan Masyarakat).
11. Aplikasi Pemetaan.
12. Aplikasi *E-Performance*.

e. Capaian Reform: Kepemerintahan, Transformasi Kelembagaan, Pengembangan Layanan Publik

1. Capaian Reformasi Kepemerintahan

Kanwil DJBC Maluku telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola. Untuk meningkatkan tata kelola tersebut Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal Kementerian Keuangan telah melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi) mencakup tema pengawasan seperti

peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan SOP layanan unggulan. Dari hasil pengawasan tersebut salah satu rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) yang dapat mencakup tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Beberapa hal yang telah dicapai oleh Kanwil DJBC Maluku terkait dengan upaya peningkatan good governance, antara lain:

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, Kanwil DJBC Maluku telah membuat sasaran strategis “Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi, Pengendalian Mutu yang Optimal dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal”:

1. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

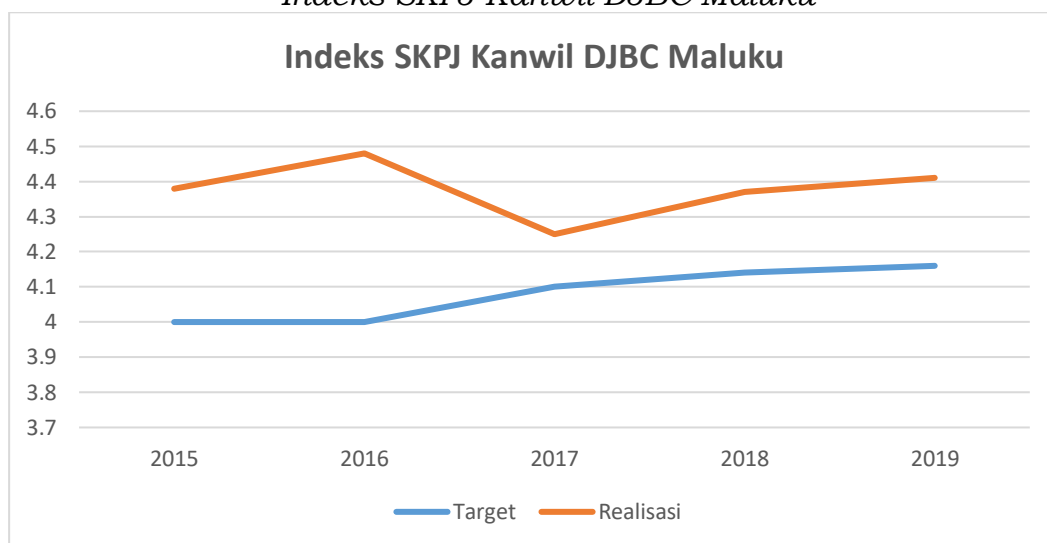
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan, yaitu pengguna jasa, terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan oleh Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC. Selama tahun 2015 s.d. 2019, capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi selalu melebihi 100%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa”.

Selama tahun 2015 s.d 2019, capaian IKU tersebut melebihi target dan mendapat predikat/kategori “Sangat Puas”. Capaian IKU tersebut diperoleh dari hasil Kantor Pusat DJBC dengan melakukan survei internal terhadap pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang biasanya dilaksanakan pada akhir triwulan III sampai triwulan IV. Pengguna jasa yang disurvei adalah *sampling* dari beberapa pengguna jasa kepabeanan dan cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku. Dalam survei tersebut, terdapat 4 variabel yang dinilai yaitu sistem dan prosedur layanan, pegawai dan petugas pelayanan, sarana dan prasarana kantor, dan layanan informasi. Hasil survei kepuasan pengguna jasa yang diraih oleh Kanwil DJBC Maluku merupakan hasil kompilasi survei kepuasan pengguna jasa yang diselenggarakan oleh KPPBC di bawah Lingkungan Kanwil DJBC Maluku.

Pada tahun 2015 s.d. 2016, terdapat 13 unit kerja (KPPBC) di bawah Lingkungan Kanwil DJBC Maluku dan berdasarkan keputusan reorganisasi yang diatur dalam PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada tahun 2017 s.d. sekarang hanya terdapat 3 KPPBC yang berada di bawah Lingkungan Kanwil DJBC Maluku. Berikut merupakan grafik capaian IKU Indeks Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Maluku pada tahun 2015 s.d. 2019.

Grafik 3
Indeks SKPJ Kanwil DJBC Maluku



2. Pengendalian Mutu yang Optimal

Pengendalian Mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Capaian Sasaran Strategis pengendalian mutu yang optimal pada tahun 2015 s.d. 2019 selalu melebihi 100%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu “Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal” dan “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional”.

Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
2. Pemantauan pengendalian utama;
3. Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja;
4. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat; dan

5. Investigasi internal.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas yang selanjutnya disingkat PKPT adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Beadan Cukai. Tahap pelaksanaan PKPT dimulai dari penyampaian tema/DROP PKPT ke Kantor Pusat, pelaksanaan PKPT, penyampaian rekomendasi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Jenis PKPT dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: PKTP Umum, PKPT Khusus dan PKPT Bersama.

Tujuan dari PKPT adalah memastikan apakah suatu proses bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi unsur efektif, efisien dan ekonomis. Hasil akhir dari PKPT adalah rekomendasi perbaikan proses bisnis, regulasi dan dapat diteruskan menjadi investigasi internal apabila dalam pelaksanaannya diperoleh indikasi *fraud* yang signifikan. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh unit kerja yang diperiksa pada tahun berjalan. Selama tahun 2015 s.d. 2019, semua rekomendasi PKPT telah ditindaklanjuti dan sebagian besar rekomendasinya dinyatakan berkualitas oleh unit kerja yang diperiksa.

Tabel 10
Kegiatan PKPT

Tahun	No	Unit Kerja	Tema PKPT
2015	1	KPPBC TMP C Ternate	Pengelolaan Manifest
	2	KPPBC Tipe Pratama Tual	Pengelolaan RKSP, PIB, PEB, dokumen pelengkap Pabean, dan pengarsipan
	3	KPPBC Tipe Pratama Manokwari	Pembongkaran/Penimbunan di Luar Kawasan Pabean dan Pengelolaan Manifest
2016	1	KPPBC Tipe Pratama Merauke	Sarana Pengawasan Pada KPPBC Tipe Pratama Merauke
	2	KPPBC TMP C Ternate	Pelayanan dan Pengawasan Barang Impor
	3	KPPBC Tipe Pratama Tual	Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Pengawasan pada KPPBC Tipe Pratama Tual
2017	1	PSO BC Sorong	Kesiapan Berlayar Kapal Patroli
	2	Bidang Kepabeanan	Pengelolaan Data dan

		dan Cukai Kanwil DJBC Maluku	Penyelesaian Perijinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
	3	KPPBC TP Babo	Pelayanan dan Pengawasan Barang Ekspor (PKPT Khusus)
2018	1	Bidang P2 Kanwil DJBC Maluku	Administrasi DKOPPN
	2	Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Nilai Pabean II
	3	KPPBC TMP C Ternate	Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar (PKPT Bersama)
2019	1	Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku	Penatausahaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang Termasuk BMN
	2	Bidang P2 Kanwil DJBC Maluku	Kegiatan Operasi Pasar Terhadap BKC

Pemantauan Pengendalian Utama

Dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern, dilakukan pemantauan pengendalian intern pada masing-masing unit kerja. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan. Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern melalui Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR).

Kegiatan yang dipantau masing-masing Kantor menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT). Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam LHPPU. LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya.

Adapun jumlah rekomendasi PPU yang diterbitkan oleh Kanwil DJBC Maluku dari tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Pemantauan Pengendalian Utama

Tahun	Proses Bisnis yang Dipantau	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	N/A	N/A
	Penindakan Pelanggaran	2	2
2018	Penyusunan dan Pemutakhiran <i>Database</i> Nilai Pabean II	N/A	N/A
	Penatausahaan Barang Hasil Penindakan Pelayanan	3	3
	Keberatan di Bidang Kepabeanan	N/A	N/A
2019	Produk Hasil Intelijen	N/A	N/A
	Penatausahaan Barang Hasil Penindakan	3	3

Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi pengelolaan kinerja pada tahun 2015 s.d. 2019 dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2014 dan KEP-768/BC/2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJBC. Evaluasi pengelolaan kinerja bertujuan untuk:

- a) mendorong terciptanya keselarasan dalam proses pengelolaan kinerja;
- b) mendorong inovasi dalam pengelolaan kinerja di lingkungan DJBC serta inisiatif dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan DJBC, dan

- c) hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai, bahwa nilai tersebut menggambarkan kualitas pengelolaan kinerja satker.

Tabel 12
Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Tahun	No	Unit Kerja	Nilai evaluasi	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
2015	1	KPPBC Nabire	86,47	1
2016	1	KPPBC Amamapare	96,03	1
	2	KPPBC Ambon	86,25	2
2017	1	KPPBC Jayapura	90,61	1
	2	KPPBC Tual	83,82	2
2018	1	KPPBC Ternate	76,32	1
	2	KPPBC Tual	80,59	2
2019	1	KPPBC Ternate	85,51	9
	2	KPPBC Ambon	91,39	6

Review Pengelolaan Kinerja oleh Biro Perencanaan Keuangan

Pada tahun 2018, Kanwil DJBC Maluku dievaluasi pengelolaan kinerjanya oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan evaluasi, didahului dengan *entry meeting* yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, para Kepala Bidang/Bagian, para Kepala Seksi/Kasubbag dan para pelaksana. Dalam *entry meeting* tersebut dipaparkan visi, misi, peta strategi, struktur organisasi, SDM dan sarana prasarana di Kanwil DJBC Maluku.

Selain itu juga dipaparkan program deklarasi peningkatan ekspor menuju Maluku Jaya yang merupakan program strategis tahun 2018 serta inovasi-inovasi lainnya. Seluruh dokumen telah tersedia dan tertib administrasi dengan baik. Secara umum, hasil revidu atas pengelolaan kinerja dinyatakan dengan “Sangat Baik” dengan rincian sebagai berikut :

- a) Perencanaan strategi

Revidu perencanaan strategi dilakukan dengan merevidu proses penyusunan Anggaran, Renja dan RKA-KL yang mengacu pada Renstra Kanwil DJBC Maluku. Berdasarkan hasil revidu, proses penyusunan tersebut sudah sangat baik dengan melibatkan seluruh jajaran

pimpinan di Kanwil DJBC Maluku dan telah tertib administrasi.

b) Eksekusi strategi

Reviu eksekusi strategi dilakukan dengan cara mereviu Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Lembar Penetapan Manual IKU, Laporan Capaian Kinerja dan Bukti Pendukung Capaian Kinerja seluruh pejabat/pegawai di Kanwil DJBC Maluku. Secara umum, hasil reviu atas eksekusi strategi telah dinyatakan sangat baik sebagaimana yang diatur dalam KMK-467/KMK.01/2014 dan SE-47/MK/2014.

c) Perencanaan Kegiatan

Reviu perencanaan kegiatan dilakukan dengan cara mereviu Inisiatif Strategis (IS) yang terdapat dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku. Terdapat 3 IS yang direviu dan berdasarkan hasil reviu tersebut, perencanaan kegiatan dinyatakan sangat baik karena IS telah disusun relevan dengan pencapaian IKU dan bukan merupakan program/kegiatan rutin.

d) Monitoring dan Evaluasi

Reviu monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara mereviu pelaksanaan penyampaian Laporan Capaian Kinerja (LCK). Berdasarkan hasil reviu, format LCK Kepala Kantor telah sesuai IIAA (*Issues, Implication, Action, Accountability*) sebagaimana yang diatur dalam KMK-590/MK.01/2019. LCK Kepala Kantor disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal secara tepat waktu setiap bulan . Sebelum LCK disampaikan, maka diadakan rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) untuk memonitor dan evaluasi capaian kinerja sehingga kualitas pencapaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, hasil reviu monitoring dan evaluasi dinyatakan sangat baik.

e) Perbaikan berkesinambungan

Reviu perbaikan berkesinambungan dilakukan dengan cara mereviu pelaksanaan perbaikan pengelolaan kinerja. Berdasarkan hasil reviu, perbaikan berkesinambungan telah berjalan dengan sangat baik karena telah dilakukan kegiatan internalisasi pegawai terkait pengelolaan kinerja dan telah dilakukannya evaluasi pengelolaan kinerja. Secara keseluruhan, reviu perbaikan berkesinambungan dinyatakan sangat baik.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC. Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Adapun jumlah pengaduan yang diterima dan yang diselesaikan oleh Kanwil DJBC Maluku dan KPPBC dibawahnya selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Penanganan SIPUMA

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan
2015	3	3
2016	3	3
2017	1	N/A
2018	N/A	1*
2019	N/A	N/A

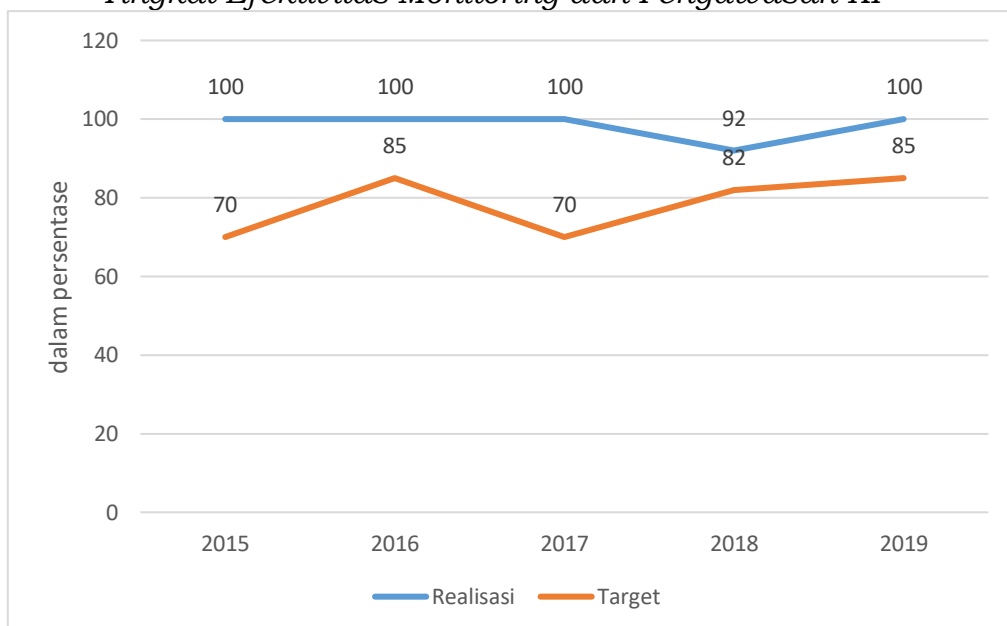
*Penyelesaian pengaduan saldo tahun 2017

Investigasi Internal

Investigasi internal adalah proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari hasil audit/investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan atau UKI. Selama tahun 2015 s.d. 2019 tidak ada investigasi internal yang dilakukan.

Dikarenakan IKU “Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal” terdiri dari 5 komponen, maka realisasi capaian IKU diperoleh dari rata-rata realisasi semua komponen yang ada. Berikut merupakan realisasi capaian IKU “Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal” selama 2015 s.d. 2019.

Grafik 4
Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu hasil audit atas kinerja DJBC (*compliance audit*). Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Unit yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti:

1. PUSKI KC bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC;
2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada Kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;
3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

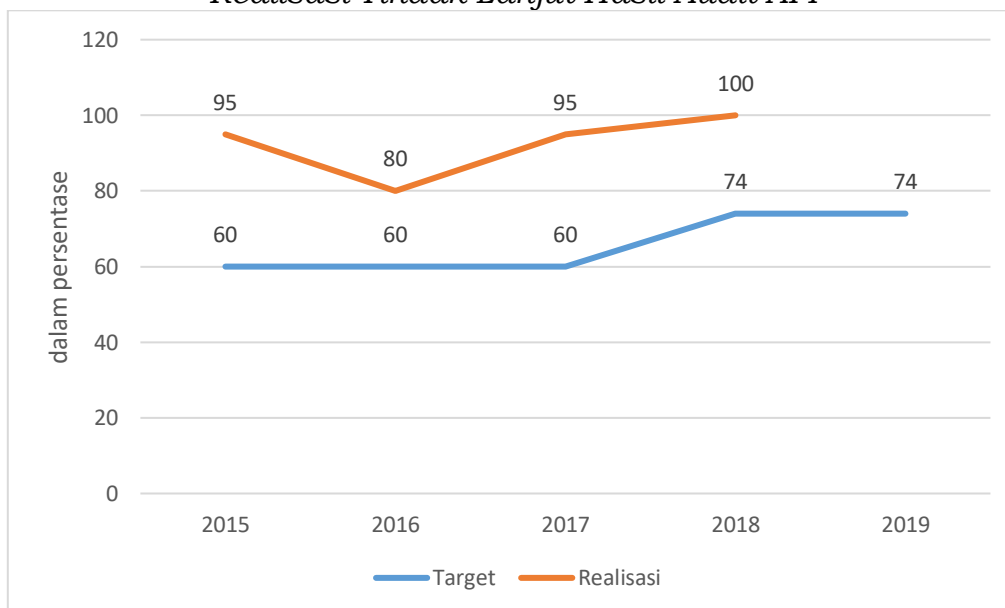
Sedangkan temuan APF dinyatakan tuntas apabila berdasarkan hasil pembahasan dengan aparat APF dan tindak lanjut dinyatakan dapat diterima oleh aparat APF. Adapun saldo rekomendasi APF dan telah dinyatakan tuntas selama tahun 2015 s.d. 2019 di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku adalah sebagai berikut:

*Tabel 14
Rekomendasi temuan APF yang Telah Selesai Ditindaklanjuti*

No	Unit Kerja	Saldo APF	Saldo APF yang dinyatakan telah selesai ditindak lanjuti secara tuntas
1	KPPBC Manokwari	1	1
2	KPPBC Ternate	1	1
3	KPPBC Ambon	1	1
4	KPPBC Jayapura	1	1
5	KPPBC Sorong	11	10

Untuk KPPBC Sorong, jumlah saldo rekomendasi APF yang belum tuntas per Desember 2017 sebanyak 1, namun karena terjadi reorganisasi pada tahun 2017 maka KPPBC Sorong tidak berada lagi dibawah tanggung jawab Kanwil DJBC Maluku melainkan menjadi tanggung jawab Kanwil DJCB Khusus Papua dan Papua Barat. Berikut merupakan grafik realisasi capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional (APF)” selama tahun 2015 s.d. 2019.

*Grafik 5
Realisasi Tindak Lanjut Hasil Audit APF*



*Tahun 2019 tidak ada data (N/A)

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, Kanwil DJBC Maluku memiliki sasaran strategis “Pengelolaan Keuangan yang Optimal”, diukur melalui IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”. Adapun realisasi capaian IKU selama tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

*Grafik 6
Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran*



Keberhasilan Kanwil DJBC Maluku dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya terbukti dengan Keberhasilan Kanwil DJBC Maluku dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari Kantor Pusat DJBC sebagai Kantor Wilayah Terbaik 1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2019 untuk kategori Kantor Wilayah yang membawahi sampai dengan 6 (enam) Satuan Kerja serta penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon sebagai Satuan Kerja Terbaik Kedua berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Sedang Semester II Tahun Anggaran 2019.

*Gambar 1
Suasana Saat Pemberian Penghargaan Kanwil Terbaik 1 dari Kantor Pusat DJBC*



b. Manajemen Risiko

Dalam rangka memitigasi hambatan dan kendala organisasi untuk mencapai tujuan sasaran strategisnya, maka perlu dilakukannya manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan dengan penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR). Dalam manajemen risiko, sejak tahun 2016-2019, DJBC telah melakukan penilaian TkPMR. Bidang Kepatuhan Internal telah melakukan penilaian TkPMR di Kanwil DJBC Maluku dengan mendapat nilai 81,95 (*Strong*) pada tahun 2018 dan 91,43 (*Strong*) pada tahun 2019.

c. Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern DJBC dilakukan dengan berpedoman pada KMK-940/KMK.09/2017. Tingkat penerapan pengendalian intern di Kanwil DJBC Maluku diperoleh dari hasil Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan Kode Etik Pemantauan Pengendalian Internal Tingkat Aktivitas (PPITA) atau yang biasa disebut dengan Penerapan Pengendalian Utama (PPU) yang dilakukan setiap bulan yang dimana termasuk dalam komponen Capaian IKU “Rata-rata persentase efektivitas monitoring dan evaluasi kepatuhan internal”.

Untuk evaluasi EPITE, Pada Tahun 2018, Kanwil DJBC Maluku melakukan evaluasi EPITE dengan memperoleh skor 96% (tinggi) yang berarti bahwa pengendalian internal dinyatakan efektif atau tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material.

d. Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Dalam bidang pencegahan Kanwil DJBC Maluku terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan

penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan penerapan konsep *Three Lines of Defense*, memberikan edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi baik kepada pejabat/pegawai DJBC, para *stakeholders* dan pengguna jasa, membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi penanganan pengaduan masyarakat (SiPUMA) yang terintegrasi dengan Whistle Blowing System (WiSe) Kementerian Keuangan, dan membuat MoU dengan institusi penegak hukum lainnya, asosiasi pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta institusi pemerintah dan swasta lainnya yang terkait dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga terlibat aktif dalam kebijakan Kementerian Keuangan dalam menyusun Peta Rawan Korupsi, membuat kebijakan pengendalian gratifikasi, mengembangkan program zona integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dan dengan melakukan penilaian kepada KPPBC dibawahnya dalam rangka mendapat predikat (WBK/WBBM).

Selanjutnya, upaya pencegahan perilaku korupsi juga dimulai dari internal dalam rangka penguatan integritas dalam bekerja. Beberapa program yang telah dilakukan dalam rangka penegakan integritas diantaranya yaitu PKPT, penanganan pengaduan, pemeriksaan mendadak, investigasi internal, penjaminan kualitas proses bisnis, dan pengelolaan kinerja.

2. Capaian Reformasi Transformasi Kelembagaan

a. Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC)

Sejak Januari 2017, DJBC telah menggulirkan program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang lahir sebagai respon dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus meningkat terhadap DJBC. Tuntutan tersebut meliputi optimalisasi pemberian fasilitas kepabeanan dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, kemudahan ekspor-impor dalam rangka mempercepat arus logistik, perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang berbahaya seperti narkoba, dan barang larangan lainnya, memastikan perlindungan industri dalam negeri, sampai dengan tuntutan untuk tetap melakukan optimalisasi penerimaan negara.

Penguatan reformasi kali ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC yang sesuai asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan fungsi DJBC yang optimal, adil dan terus menerus dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Secara teknis program reform DJBC ini dirancang dalam empat tema besaran yaitu:

1. Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan;
2. Optimalisasi Penerimaan;
3. Penguatan Fasilitasi; dan
4. Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan.

Kemudian 4 tema besaran ini didetailkan ke dalam 19 Inisiatif Strategis (IS) yang merupakan program tematik yang berdampak signifikan, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders* dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengendalian titik rawan integritas;
2. Revitalisasi budaya organisasi;
3. Peningkatan profesionalisme Pegawai DJBC Berbasis *Reward and Punishment*;
4. Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana;
5. *Reengineering* organisasi DJBC;
6. *Joint program* DJBC dan DJP;
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan;
8. Integrasi proses bisnis dan utilisasi *database*;
9. Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah;
10. Pemberian fasilitasi tepat sasaran;
11. Penyederhanaan perizinan fasilitas;
12. Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai;
13. Pengembangan otomasi pelayanan;
14. Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai;
15. Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk *perbaikan dwelling time* dan EODB;
16. Revitalisasi peran DJBC di perbatasan;
17. Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai;
18. Pemantauan pencetakan pita cukai; dan
19. Revitalisasi peran dan sinergi kantor vertikal.

Secara umum, *progress* dari Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang sudah

bergulir sejak awal 2017 ini berjalan dengan baik dimana target penyelesaian program di tahun 2017 mencapai 92% dari target 85% dan di tahun 2018 penyelesaian program mencapai 90% dari target 85%, selanjutnya penyelesaian program PRKC tahun 2019 mencapai 90% atau 76% dari total penyelesaian sampai dengan 2020. Sementara secara keseluruhan program PRKC di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku telah mencapai 100%.

b. *Reform by Location*

Kanwil DJBC Maluku juga memiliki program *Reform by Location* tahun 2017-2020 sebagai bagian dari PRKC yang sesuai kekhususan wilayah kerja kanwil. Beberapa program terobosan (*reform by location*) yang telah dilakukan dalam rangka mendukung program PRKC seperti pada tabel berikut:

Tabel 15
Reform By Location yang telah dilaksanakan 2017-2019

No	Program Terobosan	Kegiatan yang telah dilaksanakan
1	Pelaksanaan <i>spot check</i> titik rawan integritas di lingkungan Kanwil DJBC meliputi: (a) Pelayanan pemeriksaan fisik barang impor. (b) Pengawasan dan pelayanan fasilitas TPB. (c) Pengawasan pemuatan bongkar timbun dan muat di luar kawasan pabean. (d) Pelayanan manifes. (e) Pengawasan dan pelayanan kantor pos lalu bea dll.	a. Memetakan titik rawan, memetakan perilaku pegawai (profiling SDM) dengan parameter: kedisiplinan, perilaku, laporan pengaduan, kinerja, laporan waskat, temuan internal dan eksternal b. Pelaksanaan <i>spot check</i> secara berkesinambungan di seluruh wilayah Kanwil
2	<i>Joint program</i> bersama DJP terkait pertukaran data, analisis data, joint audit (untuk Kanwil tertentu), penagihan, penyitaan, gijzelig (penyanderaan), dan <i>secondment</i>	a. Berkoordinasi dengan Kantor vertikal DJP. b. Melakukan pertukaran data transaksi / <i>joint analysis</i> / <i>joint audit</i> / <i>joint collection</i> . c. Melaksana-kan program <i>secondment</i> antara Kanwil DJBC dengan Kanwil DJP terkait.
3	Peningkatan jumlah pengusaha IKM yang berorientasi ekspor untuk menggunakan fasilitas KITE IKM	a. Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Pemerintah Daerah setempat b. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi fasilitas KITE IKM kepada

		sentra industri kecil dan menengah
4	Peningkatan jumlah pengusaha patuh melalui sosialisasi dan pembinaan kepada stakeholder	<p>a. Melakukan kegiatan sosialisasi intensif prosedural (MITA, AEO) kepada <i>stakeholder</i></p> <p>b. Melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada <i>stakeholder</i> untuk meningkat-kan tingkat kepatuhan.</p>
5	Sosialisasi program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah/KPU DJBC dan kepada <i>stakeholder</i>	<p>a. Melakukan sosialisasi program PRKC dengan penekanan pada aspek integritas dan budaya organisasi internal.</p> <p>b. Mengkomunikasikan program PRKC kepada para <i>stakeholder</i></p> <p>c. Melakukan eskalasi isu kebijakan strategis (sesuai SE-18/2016).</p>
6	<i>Targetting Tools</i> untuk patroli laut	CSS, Aplikasi AIS, <i>Marine Traffic</i> , Puskodal Intel dan Operasi Laut
7	Pengembangan dan penerapan Sistem Pelayanan dan Pengawasan Impor Sementara (SILAWASIS)	Pengembangan dan penerapan Sistem Pelayanan dan Pengawasan Impor Sementara (SILAWASIS) di lingkungan Kanwil MPPB pada kuartal 3

3. Capaian Reformasi Pengembangan Layanan Publik

a. Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT)

Keputusan Menteri Keuangan yang saat ini menjadi pedoman penilaian lomba KPT di lingkungan Kementerian Keuangan adalah KMK nomor 49/KMK.01/2019. Pada tahun 2019 terdapat 13 kantor pelayanan yang diusulkan menjadi peserta lomba KPT dan telah diperoleh 3 besar KPT salah satunya adalah KPPBC TMP C Ambon.

b. Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Berikut merupakan jenis inovasi yang dilakukan di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku.

Tabel 15
Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Lokasi
1	Mendorong terbentuknya Tim Percepatan Ekspor untuk Maluku Jaya	Kanwil DJBC Maluku
2	Pengaturan ruang kerja dengan konsep <i>open space</i>	
3	P2 <i>Integrated Maps</i> , merupakan aplikasi pemetaan berbasis jaringan (<i>web based</i>) dengan memanfaatkan aplikasi Google Maps, My Maps dan Google Drive.	
4	Siratu (Sistem Rumah Tangga Terpadu), merupakan sistem digitalisasi dan monitoring pelayanan di bidang kerumahtanggaan Bagian Umum berbasis MS Access	
5	e-Logbook, Aplikasi <i>e-logbook</i> adalah media pelaporan capaian kinerja pegawai berbasis jaringan (<i>web based</i>) sehingga memudahkan pegawai dalam pelaporan capaian kinerja	
6	Formasi, merupakan inovasi penyederhanaan proses bisnis dan optimalisasi utilisasi IT dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean dengan menggunakan media <i>video call</i> .	KPPBC TMP C Ambon
7	E-Manise (Elektronik Monitoring Manifest Ekspor) Merupakan suatu aplikasi untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan manifest ekspor	
8	SiPERI (Sistem Informasi Pengawasan dan Pelayanan Perizinan <i>Online</i>), merupakan sistem yang dibuat dalam rangka memberikan pengawasan dan pelayanan perizinan secara <i>online</i>	
9	Rebranding Klinik Ekspor, untuk membuat eksportir/calon eksportir mudah dan nyaman berkonsultasi	KPPBC TMP C Ternate
10	Form 3D <i>Online</i> , merupakan layanan permohonan izin pemuatan barang ekspor curah secara elektronik	
11	Salero (Sistem Administrasi dan Layanan Elektronik) Merupakan aplikasi berbasis jaringan (<i>web based</i>) yang pada awalnya aplikasi ini digunakan untuk keperluan persuratan dan adminitrasi	
12	NPPBKC <i>Online</i> , merupakan aplikasi berbasis jaringan (<i>web based</i>) dalam rangka pelayanan penerbitan NPPBKC secara <i>online</i>	
13	JEDI (Jaringan Elektronik Data Intelijen), Aplikasi <i>database</i> pemetaan hasil dari kegiatan penindakan dan intelijen berbasis sistem operasi android	KPPBC TMP C Ternate

- c. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Merupakan kegiatan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku, terdapat 1 KPPBC yang memperoleh predikat WBK Tingkat Nasional yaitu KPPBC TMP C Ambon.

- d. Sertifikasi ISO 9001:2008

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sertifikasi mutu layanan dengan sistem internasional tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan prima kepada para pegawai Bea Cukai dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut akan diukur dan dievaluasi secara terus menerus untuk memastikan peningkatan sistem mutu yang berkesinambungan dan terpenuhinya peraturan yang berlaku.

Di lingkungan Kanwil DJBC Maluku terdapat KPPBC TMP C Ambon yang telah yang telah mendapat sertifikasi ISO yaitu untuk 23 jenis layanan.

1.2. Potensi dan Tantangan

Dalam upaya menjalankan tugas, Kanwil DJBC Maluku mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya Kanwil DJBC Maluku guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu, Kanwil DJBC Maluku dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil DJBC Maluku perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Kanwil DJBC Maluku akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar sesuai dengan arah kebijakan/tujuan DJBC yaitu Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi, Masyarakat, Tema Penerimaan, dan Tema Birokrasi dan Layanan Publik.

1.2.1. Potensi dan Tantangan: Perlindungan Masyarakat & Dukungan Ekonomi Masyarakat

Potensi dalam Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah:

- a. Sumber Daya Manusia pada unit pengawasan Kanwil dan KPPBC sebagian besar pegawai milenial yang handal dan memiliki potensi yang baik dalam melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai;
- b. Pimpinan memiliki komitmen, semangat dan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan pengawasan yang optimal di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Terdapat dukungan anggaran pengawasan yang memadai pada DIPA dan DOKPPN;
- d. Terdapat perangkat komputer dan jaringan internet sebagai peralatan kerja utama dalam melakukan pengawasan;
- e. Telah terbentuk *database* pengawasan (intelijen) yang *up to date* terkait kegiatan impor, ekspor dan cukai di seluruh wilayah Maluku;
- f. Terdapat sistem aplikasi pendukung kinerja pegawai unit pengawasan seperti CEISA, EXSIS dan CITAC yang berlaku secara nasional;
- g. Terdapat sistem monitoring pergerakan kapal seperti AIS, *marinetraffic*, dan *Vessel Finder* yang mampu mendeteksi

keberadaan kapal di perairan Maluku dan Maluku Utara secara *real time*;

- h. Koordinasi yang cukup baik dengan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Maluku dan Maluku Utara;
- i. Terdapat Aplikasi Penindakan berupa *website* (apppenindakan.net) sebagai *Pass Record* pelanggaran yang dilakukan oleh unit penindakan, sehingga dapat digunakan untuk *Post Seizure Analysis*;
- j. Terdapat aplikasi mandiri peta kerawanan yang dikembangkan oleh pegawai Kanwil DJBC Maluku berupa *link* dalam *gdrive* yang digunakan untuk *Pass Record* pelanggaran yang dilakukan oleh unit penindakan, sehingga dapat digunakan untuk *Post Seizure Analysis*;
- k. Pengguna jasa di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melakukan aktivitas bisnis sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Terdapat regulasi yang jelas mengenai fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- m. Organisasi DJBC (Kantor Pusat) telah memiliki sistem pengolahan data internal seperti EIS, CEISA 4.0, dan Tableau Server yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah;
- n. Hubungan dan komunikasi yang cukup baik dengan instansi pemerintah dan swasta serta para pelaku usaha dalam mendukung perekonomian melalui ekspor langsung dari Maluku dan Maluku Utara;
- o. Upaya pembinaan dan peningkatan industri penerima fasilitas kepabeanan relatif sedikit dan akan terus ditingkatkan;
- p. Telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai Proyek Strategis Nasional untuk bidang perikanan, logistik dan pariwisata dengan investasi besar yang didukung dengan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai;
- q. Terdapat sektor-sektor produksi yang potensial di Maluku dan Maluku Utara selain bidang pertambangan, seperti di bidang perikanan, perkebunan dan kehutanan yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor.

Gambar 2
Peta Potensi Kerawanan Kanwil DJBC Maluku



Tantangan dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah :

- Kurangnya kompetensi pegawai Kanwil dan KPPBC di bidang intelijen dan analisis data;
- Sarana dan prasarana pengawasan yang kurang memadai (*speedboat* patroli laut) sehingga sulit menjangkau titik-titik pengawasan;
- Belum adanya *database* informasi yang dapat memetakan risiko kerawanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara;
- Belum adanya metode *sharing* informasi pengawasan yang terotomasi antara Kanwil dengan KPPBC untuk memenuhi kebutuhan *user (user friendly)*;
- Tidak terdapat akses untuk melakukan penarikan data dari aplikasi CEISA, EXSIS dan CITAC (Koordinasi dengan Kantor Pusat terkait Tableau);
- Pengguna jasa dan *stakeholder* terutama di bidang cukai masih ada yang belum patuh terhadap kewajiban pencatatan dan pelaporan;
- Geografis wilayah pengawasan yang terdiri laut, darat dan pulau-pulau serta berbatasan dengan negara lain;
- Banyaknya pintu masuk perbatasan laut serta perairan pelabuhan antar pulau, yang belum sepenuhnya dapat diawasi oleh pegawai;
- Kondisi cuaca buruk dan gelombang yang tinggi menjadi faktor penghambat utama dalam melakukan patroli laut

karena kapal yang digunakan tidak dapat menghadapi kondisi tersebut;

- j. Sistem/mekanisme pertukaran informasi/data dengan instansi terkait (eksternal) belum terbentuk;
- k. Pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan cukai;
- l. Menurunnya permintaan ekspor ikan ke China dan Hongkong akibat pandemi Covid-19;
- m. Tidak adanya *direct shipment* dari wilayah Maluku dan Maluku Utara sehingga pelaku usaha tidak dapat melakukan ekspor langsung.

1.2.2. Potensi dan Tantangan: Penerimaan

Potensi dalam Penerimaan adalah :

- a. Terdapat kualitas SDM yang handal dalam melakukan Perencanaan Distribusi Target Penerimaan masing – masing satuan kerja yang dilakukan secara cermat dan sistematis;
- b. Tersedianya data dan informasi terkait Pemutakhiran data barang impor melalui pengelolaan profil Database Nilai Pabean II;
- c. Tersedianya system aplikasi Pengelolaan monitoring dan evaluasi data realisasi penerimaan, penyelesaian piutang dan devisa ekspor – impor melalui Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP);
- d. Bea Masuk masih menjadi komponen utama penerimaan di Lingkungan Kanwil DJBC Maluku yaitu dari KPPBC TMP C Ternate. Penerimaan Bea Masuk Sebagian besar diperoleh dari importasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Maluku Utara;
- e. Potensi penerimaan bea keluar dari adanya eksportasi mineral berupa konsentrat pasir besi di Halmahera Barat dan rencana eksportasi produk kelapa sawit di daerah Halmahera Selatan;
- f. Terdapat proyek pembangunan blok Masela memasuki masa konstruksi pada tahun 2022;
- g. Adanya rencana implementasi kebijakan NLE (*National Logistic Ecosystem*).

Tantangan dalam Tema Penerimaan adalah :

- a. Frekuensi importasi di KPPBC Ambon dan KPPBC Tual masih rendah sehingga penerimaan dari bea masuk sangat sulit dicapai;
- b. Sebagian besar importasi menggunakan fasilitas SKA dan BKPM (*Master list*) sehingga perlu penelitian dokumen dan

- pemeriksaan yang lebih dalam rangka memastikan barang-barang tersebut tepat mendapatkan fasilitas;
- c. Adanya potensi piutang tak tertagih;
 - d. Kegiatan ekspor yang tidak dikenakan bea keluar;
 - e. Tingkat kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai masih kurang;
 - f. Terdapat barang impor yang diselesaikan kewajiban kepabeanannya di luar wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku dikarenakan kurangnya dukungan logistik;
 - g. Terdapat lokasi kantor perusahaan di luar wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku.

1.2.3. Potensi dan Tantangan: Birokrasi & Layanan Publik

Potensi dalam Birokrasi dan Layanan Publik adalah:

- a. Terdapat pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan atau telah berpengalaman melaksanakan tugas administrasi, teknis kepabeanan dan cukai untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan tugas melalui diklat/pelatihan, dan juga terdapat media *sharing knowledge* ke seluruh pegawai untuk meningkatkan keterampilan pegawai;
- b. Terdapat alokasi anggaran (DIPA) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, pengawasan, fasilitas dan administrasi (*money follows program*);
- c. Telah tersedianya ruang kantor dengan konsep *flexible working space* dan didukung dengan perlengkapan kantor yang cukup memadai;
- d. Telah tersedianya program pendukung kinerja seperti Nadine, Cehris, HRIS Kemenkeu, E-Performance, SAKTI, Om-SPAN, SatuDJA, GPP, SIMAN, aplikasi Zoom berbayar dan *cloud* sistem pendukung;
- e. Terdapat alokasi dana renovasi rumah dinas, dan kegiatan renovasi akan dimulai tahun 2021;
- f. Terdapat *dropping* laptop dari Kantor Pusat pada tahun 2021 untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. Terdapat komitmen pimpinan untuk melakukan reformasi birokrasi. Perlu internalisasi ke unit terkecil terkait pengalihan jabatan struktural dan fungsional untuk mengantisipasi kelancaran tugas saat pengalihan;
- h. Telah terdapat aplikasi ABK yang dapat digunakan untuk memotret kebutuhan riil pegawai tepat serta untuk mengoptimalkan kinerja pejabat fungsional PBC Pertama/Muda/Madya;

- i. Kinerja bea dan cukai yang diakui secara domestik, dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional;
- j. Telah dibangunnya zona integritas dalam rangka menuju predikat WBK/WBBM, KWT;
- k. Terdapat peluang kerjasama upaya peningkatan kepatuhan internal dan peningkatan kinerja dengan pihak lain seperti KPK, Itjen, Direktorat KI, Pemprov, Kejati, Polda, Ombudsman, Kampus, dan sebagainya;
- l. Telah tersedianya perangkat pengawasan kepatuhan internal.

Tantangan dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah :

- a. Motivasi pegawai dalam bekerja cenderung menurun setelah 2 tahun pertama penempatan karena lokasi penempatan yang cukup jauh dari daerah asalnya;
- b. Kelengkapan sarana transportasi di Pos Bantu dan Pos Pengawasan masih kurang;
- c. Jaringan internet di Kantor Pos Bantu belum ada;
- d. Masih terdapat potensi adanya KKN dan pelanggaran peraturan;
- e. Terdapat sistem mutasi dan *rolling* sehingga pegawai yang tergolong baru bekerja di unit Kepatuhan Internal belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mencegah terjadinya KKN dan pelanggaran peraturan;
- f. Terdapat *database* informasi Kepatuhan Internal yang belum lengkap seperti kondisi tugas di luar pulau, profil perusahaan, kegiatan di pos pengawasan, dan lainnya.

BAB II

KERTAS KERJA

Sebagaimana tercantum dalam Kep-198/BC/2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024 memiliki 4 tema atau tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Tujuan Kebijakan Fiskal
2. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif
3. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal
4. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Kanwil DJBC Maluku melaksanakan 3 (tiga) dari 4 (empat) tema di atas yaitu ke tema/tujuan ke-2, ke-3, dan ke-4 :

1. Tujuan Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”.

Beberapa strategi yang dilakukan Kanwil DJBC Maluku dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di provinsi Maluku dan Maluku Utara;
- b. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- c. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan;
- d. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai;
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
- f. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa;
- g. Pengawasan perdagangan barang – barang illegal yang dilarang dan/ atau dibatasi Impor dan Ekspornya;
- h. Pelaksanaan patroli laut yang efektif dan efisien;
- i. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegak hukum;
- j. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

2. Tujuan Penerimaan negara yang optimal Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal,

Sesuai arah Renstra DJBC yang akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan eskstensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra DJBC 2020-2024. Beberapa strategi yang dilakukan Kanwil DJBC Maluku dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Penerimaan negara yang optimal;
- b. Sistem informasi kepabeanan dan cukai yang andal;
- c. Penguatan kerja sama/ sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- d. Percepatan pelayanan ekspor;
- e. Penguatan proses bisnis keberatan;
- f. Peningkatan Efektivitas Audit;
- g. Penguatan *Joint Program*;
- h. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan;
- i. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan *user friendly*.

3. Tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien meliputi : 1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan 2) Reformasi/ transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan Kanwil DJBC Maluku dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Pengendalian dan pengawasan internal;
- b. Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ *delayering* kelembagaan organisasi;
- c. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional;
- d. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga;
- e. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran;
- f. Modernisasi arsip Kanwil DJBC Maluku;
- g. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum;
- h. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal;

Implentasi fokus kebijakan maupun strategi-strategi di atas dilandaskan pada penguatan budaya organisasi untuk mewujudkan SDM DJBC yang berinteritas dan berkinerja tinggi menuju Kanwil DJBC Maluku dan Direktorat Jenderal bea dan Cukai yang makin baik.

Selanjutnya dalam bab ini akan dalam kertas kerja berikut ini dijabarkan strategi, kemudian tiap strategi dijabarkan dalam program kerja, serta dan rencana tahapan (*milestone*) pelaksanaannya. Untuk memudahkan koordinasi juga ditentukan *unit in charge* dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.1
Strategi Dan Program Kerja
Tahun 2020-2024

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					Unit in Charge
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	1. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di provinsi Maluku dan Maluku Utara	1.1.1.1	Pengembangan <i>Dashboard</i> Resume Data Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Serta Sektor Industri Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Pendukung: Seluruh KPPBC
		1.1.1.1.1	Evaluasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Pemetaan Sektor Industri, dan Penyusunan Model <i>Dashboard</i>						
		1.1.1.1.2	Identifikasi dan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Data Pendukung						
		1.1.1.1.3	Pengembangan <i>Dashboard</i> dan Mekanisme Pertukaran Data						
		1.1.1.1.4	Evaluasi dan Identifikasi Rencana Pengembangan Program						
		1.1.1.1.5	Evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis						
		1.1.1.2	Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat						

		1.1.1.2.1	Inventarisasi potensi untuk Kawasan Berikat (sumber daya alam dan sumber daya manusia)						
		1.1.1.2.2	Pola pengolahan data ekspor yang efektif						
		1.1.1.3	Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor						
		1.1.1.3.1	Inventarisasi produk Maluku yang berpotensi ekspor						
		1.1.1.3.2	Pola pengolahan data ekspor yang efektif						
		1.1.1.4	Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM						
		1.1.1.4.1	Inventarisasi produk IKM di Maluku yang berpotensi untuk ekspor						
		1.1.1.4.2	Pola pengolahan data ekspor yang efektif						
		1.1.1.5	Mendorong fasilitas Kepabeanan dan Cukai di provinsi Maluku dan Maluku Utara						
		1.1.1.5.1	Penggalan/Pencarian Potensi Ekspor						
		1.1.1.5.2	Asistensi Ekspor						
		1.1.1.5.3	Optimalisasi klinik ekspor pada KPPBC						
		1.1.1.5.4	Sosialisasi fasilitas KB dan KITE						

		1.1.1.5.5	Pembimbingan dan asistensi kepada perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan fasilitas KB/KITE						
		1.1.1.6	Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk IKM						
		1.1.1.6.1	Pengembangan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk untuk industri kecil dan menengah di sektor pertanian, peternakan, atau perikanan						
		1.1.1.6.2	Peningkatan Volume Ekspor dan Industrialisasi Produk dan Komoditas Perikanan						
		1.1.1.6.3	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan di dua lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki, guna mendukung Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara - Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2020-2024						

			oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)						
1.2	1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.2.1.1	Operasi Penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor					Bidang Penindakan dan Penyidikan Seluruh KPPBC	
		1.2.1.1.1	Pembentukan <i>Narcotics Cyber Patrol</i> (NCP) Kanwil DJBC Maluku						
		1.2.1.1.2	Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNNP, Polda)						
		1.2.1.1.3	Pelaksanaan operasi pada titik <i>entry</i> dan titik distribusi						
	2. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan <i>other government agencies (OGA)</i> di perbatasan	1.2.2.1	Pelaksanaan Koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengawasan di perbatasan						
	3. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai	1.2.3.1	Pelaksanaan patroli laut						
	4. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.2.4.1	Pelaksanaan operasi pengawasan dan penindakan peredaran BKC ilegal						

5. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.2.5.1	Pelaksanaan penagihan piutang kepabeanan dan cukai secara efektif					
	1.2.5.2	Edukasi kepada pengguna jasa secara berkelanjutan					
6. Pengawasan perdagangan barang – barang illegal yang dilarang dan/ atau dibatasi Impor dan Ekspornya	1.2.6.1	Peta kerawanan yang ter- <i>update</i>					
	1.2.6.1.1	<i>Updating</i> peta kerawanan secara berkala					
	1.2.6.2	Pembuatan <i>Database</i> barang lartas					
	1.2.6.2.1	Pengumpulan data barang – barang lartas					
	1.2.6.2.2	<i>Updating</i> barang – barang lartas secara berkala					
	1.2.6.3	Operasi pengumpulan data dan informasi dengan APH terkait					
	1.2.6.3.1	Koordinasi dengan APH terkait					
	1.2.6.3.2	Operasi/ pertukaran data dan informasi					
7. Pelaksanaan patroli laut yang efektif dan efisien	1.2.7.1	Pembangunan sistem komando laut yang terintegrasi dengan KPPBC terkait maupun dengan instansi lain					
	1.2.7.1	Membangun AIS (data pergerakan kapal)					
	1.2.7.1.1	Melakukan analisis pergerakan kapal					
	1.2.7.1.2	Sinergitas dengan Kantor Pusat DJBC Subdit Patroli Laut dan KPPBC terkait					

		1.2.7.1.3	Sinergitas dan MoU dengan instansi terkait (Bakamla, TNI AL, TNI AU, KKP dan Ditpolairud)						
8. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum		1.2.8.1	Melakukan pemutakhiran data sebaran BKC HT Illegal di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku						
		1.2.8.1.1	Membuat pemetaan penyebaran BKC HT Illegal dengan melakukan Survei BKC HT						
		1.2.8.1.2	Membuat aplikasi mandiri dan mengimput hasil <i>survey</i> tersebut, dan akan di- <i>update</i> secara berkala						
		1.2.8.2	Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap BKC HT Illegal						
		1.2.8.2.1	Melakukan Sosialisasi terkait BKC HT						
		1.2.8.3	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai						
		1.2.8.3.1	Melakukan penindakan terhadap pelanggaran cukai dengan mengenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana						
		1.2.8.3.2	Monitoring dan evaluasi						
9. Sinergi pengawasan dan		1.2.9.1	Peningkatan kemampuan SDM dalam Pengawasan (Penanganan perkara dan pengelolaan BHP)						

penegakan hukum yang efektif	1.2.9.1.1	Pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat PPNS dan administrasi penyidikan di Wilayah KWBC Maluku					
	1.2.9.1.2	<i>Workshop</i> penyidikan dan TPPU di Wilayah KWBC Maluku					
	1.2.9.1.3	<i>Workshop</i> administrasi penyidikan di Wilayah Kanwil DJBC Maluku					
	1.2.9.2	Sinergi dan Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri di Wilayah Maluku dan Maluku Utara serta Korwas PPNS dalam penanganan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai					
	1.2.9.3	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Hasil Penindakan dengan optimal					
	1.2.9.3.1	Optimalisasi pemanfaatan gudang kantor untuk penyimpanan barang hasil penindakan, dan barang bukti yang berasal dari hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai					
	1.2.9.3.2	Meningkatkan sinergi dengan					

			KPKNL untuk mempercepat kegiatan pemusnahan, pelelangan BHP yang sudah ditetapkan sebagai BMN						
		1.2.9.3.3	<i>Workshop</i> pemeliharaan Barang Hasil Penindakan						
		1.2.9.4	Pelaksanaan <i>joint</i> investigasi/multi <i>door</i> investigasi						
		1.2.9.4.1	Sinergi dan Koordinasi dengan APH lain (BPOM, Imigrasi, Karantina, BNN, Polri, Kejaksaan)						
		1.2.9.4.2	FGD <i>joint</i> investigasi/multi <i>door</i> investigasi dengan APH lain (BPOM, Imigrasi, Karantina, BNN, Polri, Kejaksaan)						
		1.2.9.4.3	Pelaksanaan <i>joint</i> investigasi/multi <i>door</i> investigasi						
Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal									
2.1	1. Penerimaan negara yang optimal	2.1.1.1	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang optimal						Bidang kepabeanan dan Cukai
		2.1.1.1.1	Persiapan bahan dan materi penyusunan SOP						

		2.1.1.1.2	Penyusunan 4 (empat) SOP (SOP pembagian/penetapan target pada setiap satuan kerja (penetapan dan evaluasi target penerimaan, SOP pemetaan dan penggalian potensi penerimaan, SOP sistem komunikasi data dan informasi dan SOP prognosis target penerimaan dan pencapaiannya)						Pendukung: Seluruh KPPBC
		2.1.1.1.3	Implementasi sinergi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> di bidang kepabeanan dan cukai di masing-masing daerah satker, merancang MOU dan atau LOI dan menyaring atau memilah kegiatan ekonomi di pada setiap daerah yang dapat dikategorikan sebagai potensi penerimaan misal: pembangunan <i>smelter</i> , pembangunan <i>coldstorage</i> dan lain-lain						
		2.1.1.1.4	Monitoring rencana dan pelaksanaan kegiatan						
		2.1.1.1.5	Evaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan						

2. Sistem informasi kepabeanan dan cukai yang andal	2.1.1.2	Sistem informasi kepabeanan dan cukai yang andal				
	2.1.1.2.1	Persiapan bahan dan materi penyusunan SOP				
	2.1.1.2.2	Penyusunan 3 (tiga) SOP (SOP pemeriksaan pemasukan BKC MMEA dilokasi tugas yang terbatas (SOP kordinasi data dan informasi instansi penerbit rekomendasi perijinan Distributor, Sub Distributor, dan TPE MMEA di daerah, dan SOP kordinasi data dan informasi kegiatan kepabeanan dengan Bank Indonesia dan BPS di wilayah kerja)				
	2.1.1.2.3	Implementasi sinergi dan kolaborasi dengan KPPBC, Dinas perindustrian dan perdagangan di daerah dan BPTSP, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bank Indonesia dan BPS di Propinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara				
	2.1.1.2.4	Monitoring rencana dan pelaksanaan kegiatan				
	2.1.1.2.5	Evaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan				

2. Penguatan kerja sama/ sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.1.1.1	Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, APH, Lembaga, instansi vertikal, swasta, dan media, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota						
	2.1.1.2	Sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam kegiatan operasi penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai						
3. Percepatan pelayanan ekspor	2.1.3.1	Koordinasi dan sinergi KPPBC dengan pihak-pihak terkait dengan pelayanan ekspor						
	2.1.3.2	Perbaikan sarana layanan dan kemudahan konsultasi ekspor di KPPBC dengan memperhatikan kemajuan teknologi						
3. Penguatan proses bisnis keberatan	2.1.2.3	Peningkatan kualitas penyelesaian keberatan di Kantor Wilayah						
4. Peningkatan Efektivitas Audit	2.1.4.1	Unit Perencanaan Objek Pemeriksaan						
	2.1.4.1.1	Penyusunan SOP Perencanaan Objek Pemeriksaan, Penyiapan Data dan Pengusulan Diklat Pegawai						

		2.1.4.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta mendistribusikan pola perencanaan						
		2.1.4.1.3	Sosialisasi, Uji coba, Implementasi kegiatan perencanaan objek pemeriksaan dan pendampingan						
	5. Penguatan <i>Joint Program</i>	2.1.5.1	Pelaksanaan koordinasi dan pertukaran data dengan Kanwil DJP dan/atau Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka joint program						
		2.1.5.2	Pelaksanaan <i>Joint Analysis</i> pada Kantor Wilayah terhadap entitas perusahaan di lingkungan Kanwil DJBC Maluku terkait pelaporan kepabeanan dan cukai, perpajakan dan PNBK						
	6. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan	2.1.6.1	Sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai						
		2.1.6.2	Pelaksanaan penelitian ulang secara efektif						
		2.1.6.3	Penggalian potensi penerimaan di masing-masing KPPBC						
		2.1.6.4	Peningkatan efektivitas dan						

			effisiensi pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan						
	7. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada <i>user experience</i> dan <i>user friendly</i>	2.1.7.1	Optimalisasi pelaksanaan layanan kepabeanan dan cukai dengan Smart Ceisa dan aplikasi yang disediakan oleh Kantor Pusat DJBC						
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien									
3.1	1. Pengendalian dan pengawasan internal	3.1.1.1	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Bidang Kepatuhan Internal
		3.1.1.1.1	Men- <i>define</i> IKU yang dapat memotret beban kerja setiap pegawai						
		3.1.1.1.2	Bimbingan teknis Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional						Pendukung: Seluruh KPPBC
		3.1.1.2	Penegakan Kepatuhan Internal						
		3.1.1.2.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						
		3.1.1.2.2	Pemantauan Pengendalian Intern						
		3.1.1.2.3	Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai						
		3.1.1.2.4	Pembinaan Mental Pegawai						
		3.1.1.2.5	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat						

		3.1.1.2.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						
		3.1.1.2.7	Investigasi Internal						
		3.1.1.2.8	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						
		3.1.1.3	Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal						
		3.1.1.3.1	Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal						
		3.1.1.3.2	Penerapan Pengendalian Intern						
		3.1.1.3.3	Penerapan Budaya Kinerja yang baik						
		3.1.1.4	Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal						
		3.1.1.4.1	Evaluasi Pengelolaan Kinerja						
		3.1.1.5	Pemanfaatan Sistem dan Infrastruktur Kepatuhan Internal						
		3.1.1.5	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPUMA, SMIP, <i>e-performance</i> , <i>e-logbook</i> , Pro UKI						
	2. Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ <i>delayering</i> kelembagaan organisasi	3.1.2.1	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC						
		3.1.2.1.1	Pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)						
		3.1.2.2	Analisis beban kerja untuk efektivitas penempatan Pejabat Fungsional seluruh satker di Kanwil DJBC Maluku						
		3.1.2.2.1	Melakukan Analisis Beban						

			Kerja seluruh satker						
		3.1.2.2.2	Evaluasi hasil Analisis Beban Kerja Pejabat Fungsional						
		3.1.2.3	Penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis pada Pejabat Fungsional KPPBC TMP C pada Kanwil DJBC Maluku						
		3.1.2.3.1	Penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis						
		3.1.2.3.2	Pengajuan rekomendasi perbaikan proses bisnis						
3.2	1. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional	3.2.1.1	<i>Production Studio</i>						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Pendukung: Seluruh KPPBC
		3.2.1.2	Manajemen Publikasi						
			Pembuatan <i>content planning</i> publikasi media sosial						
	3.2.2.1	<i>Stakeholder Engagement</i> atau membangun interaksi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan							
	3.2.2.2	<i>Public Opinion Building</i> atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC							

		3.2.2.3	Penyiapan dan koordinasi penyusunan kerja sama antar lembaga						
3.3	1. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.3.1.1	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						Bagian Umum Pendukung: Seluruh KPPBC
		3.3.1.1.1	Menerapkan <i>Self Assessment</i> Pengelolaan Anggaran yang akuntabel secara triwulanan						
		3.3.1.2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						
		3.3.1.2.1	Penyusunan RKAKL						
		3.3.1.2.2	<i>Redesign</i> Sistem Penganggaran						
		3.3.1.3	Monitoring dan Evaluasi Belanja						
		3.3.1.3.1	Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja satker DJBC						
		3.3.1.3.2	Melakukan asistensi dan pendampingan dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal						
		3.3.1.3.3	Melakukan mitigasi resiko dan pemantauan terhadap belanja modal						
		3.3.1.3.4	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA						
3.3.1.3.5	Verifikasi dan penelaahan Laporan Keuangan tingkat								

			UAPPA-W						
		3.3.1.3.6	Bimbingan Teknis Akuntansi						
		3.3.1.3.7	Monitoring, validasi transaksi aset dan keuangan, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan						
	2. Modernisasi Arsip Kanwil DJBC Maluku	3.3.2.1	Arsip 4.0						
		3.3.2.1.1	Inventarisir arsip pasca pengembangan SKP (CEISA dll) dan Nadine (<i>Office</i> Kemenkeu)						
		3.3.2.1.2	Digitalisasi Arsip						
	3. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	3.3.3.1	Akurasi data analisis beban kerja						
		3.3.3.1.1	Penyusunan formulir kegiatan / pekerjaan masing masing pegawai						
		3.3.3.1.2	Penempatan dan kesesuaian jumlah pegawai pada masing masing satker sesuai hasil ABK						
		3.3.3.1.3	Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan						
		3.3.3.1.4	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran						
		3.3.3.2	Pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran						
		3.3.3.2.1	Pelaksanaan <i>Coaching, Mentoring, dan Counseling (CMC)</i>						
		3.3.3.3	Pengangkatan pada jabatan fungsional						

		3.3.3.3.1	Pengusulan dan penetapan pejabat fungsional						
		3.3.3.4	Pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai						
		3.3.3.4.1	Mengusulkan permintaan penghargaan tahun sebelumnya						
4. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal		3.3.4.1	Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal						
		3.3.4.2	Penyusunan RKBMN Tahun 2022						
		3.3.4.3	Penyusunan RKBMN Tahun 2023						
		3.3.4.4	Penyusunan RKBMN Tahun 2024						
		3.3.4.5	Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan BMN						
		3.3.4.6	Pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja DJBC						
		3.3.4.7	Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel						
		3.3.4.8	Updating Data BMN Strategis 86%						
		3.3.4.9	Penyusunan Laporan BMN TA 2019						
		3.3.4.10	Updating Data BMN Strategis 88%						
		3.3.4.11	Penyusunan Laporan BMN TA 2020						
		3.3.4.12	Updating Data BMN Strategis						

			90%						
		3.3.4.13	Penyusunan Laporan BMN TA 2021						
		3.3.4.14	Updating Data BMN Strategis 92%						
		3.3.4.15	Penyusunan Laporan BMN TA 2022						
		3.3.4.16	Updating Data BMN Strategis 94%						
		3.3.4.17	Penyusunan Laporan BMN TA 2023						
		3.3.4.18	Pengamanan BMN Strategis						
		3.3.4.19	Monev data penghunian Rumah Negara						
		3.3.4.20	Pendataan dan monitoring BMN <i>idle</i> pada Satker						
		3.3.4.21	Penyusunan <i>Database</i> Satuan Kerja yang memiliki kasus sengketa BMN						
		3.3.4.22	Penyusunan data base sertifikat BMN berupa tanah di Lingkungan Kanwil Maluku						
		3.3.4.2	Alih fungsi rumah negara pada KPPBC Ambon sebagai <i>mess</i> /rumah susun negara yang akan di dikelola oleh Kanwil DJBC Maluku, dengan biaya perawatan ditanggung negara (DIPA)						
		3.3.4.2.1	Pembahasan internal antara Kanwil DJBC Maluku selaku satker dan KPPBC Ambon						

			dalam hal rencana pengelolaan bersama rumah negara						
			Pengambilalihan penggunaan rumah negara untuk dikelola oleh Kanwil DJBC Maluku, yang dapat digunakan bersama oleh pegawai Kanwil Maluku dan KPPBC Ambon						
		3.3.4.2.2	Rehabilitasi/penghancuran rumah yang diambilalih untuk kemudian dibangun <i>mess</i> /rumah susun negara yang dananya dibebankan DIPA sampai dalam kondisi layak dan nyaman, dilengkapi fasilitas untuk menunjang kinerja pegawai, diantaranya: flexible working space pada saat WFH, tempat olah raga, kantin, dan bus jemputan						
		3.3.4.2.3	Pemeliharaan rumah negara ditanggung dibebankan pada DIPA dengan syarat setiap penghuni dibebani biaya sewa rumah yang terjangkau, karena biaya sewa tersebut nantinya akan dimanfaatkan						

			sebagian biaya perawatan						
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) dan *Reform by Location* (RBL)

PRKC pertama kali diluncurkan DJBC pada tahun 2016 dengan mengusung 19 inisiatif strategis program yang dijabarkan dari empat tema yang akan diselesaikan hingga tahun 2020. Berikut merupakan tema dan inisiatif strategis Program PRKC tersebut:

No	Tema	Inisiatif Strategis
1.	Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan	1) Pengendalian titik rawan integritas 2) Revitalisasi budaya organisasi 3) Peningkatan profesionalisme pegawai 4) Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana 5) <i>Reengineering</i> organisasi DJBC
2.	Optimalisasi Penerimaan Negara	6) <i>Joint</i> program DJBC dan DJP 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan 8) Integrasi proses bisnis dan utilisasi database
3.	Penguatan Fasilitas Perdagangan dan Industri	9) Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah 10) Pemberian fasilitas tepat sasaran 11) Penyederhanaan perizinan dan perluasan fasilitas
4.	Penguatan Efektifitas Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat	12) Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai 13) Pengembangan otomasi pelayanan 14) Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi 15) Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan <i>dwelling time</i> dan EODB 16) Revitalisasi peran DJBC di perbatasan 17) Pengembangan sistem pengawasan kepabeanaan dan cukai 18) Pemantauan pencetakan pita cukai 19) Penguatan peran pengawasan <i>post-clearance</i>

PRKC yang akan berakhir pada tahun 2020 di atas akan dilanjutkan dengan PRKC lanjutan yang memfokuskan pada lima inisiatif strategis di tahap awal dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tiap tahun hingga tahun 2024 dengan tetap mengacu pada empat tema yang ditetapkan.

Adapun inisiatif strategis yang akan dijalankan merupakan penjabaran dari empat tema yang diusung pada periode sebelumnya, yaitu:

- a. Tema Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan mengusung inisiatif strategis berupa Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC (Tahap Lanjutan)
- b. Tema Optimalisasi Penerimaan Negara dengan inisiatif strategis yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan

- c. Tema Peningkatan Fasilitas Perdagangan dan Industri dijabarkan pada inisiatif strategis berupa Peningkatan Ekspor dan Dukungan Industri Nasional
- d. Tema Penguatan Efektivitas Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat memiliki dua inisiatif strategis yaitu Implementasi *Indonesia Single Risk Management (ISRM)* dan Implementasi CEISA 4.0 (*Indonesia Smart Customs and Excise*).

Untuk menyukseskan pelaksanaan program reformasi ini, unit vertikal akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program reformasi ini melalui program Reform by Location yang merupakan program usulan tiap-tiap unit vertikal yang disusun dengan timeline yang disesuaikan dengan pelaksanaan PRKC.

Berikut ini *Reform by Location* Kanwil DJBC Maluku tahun 2021-2024:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan *Reform By Location*
Kanwil DJBC Maluku Tahun 2021-2024

No	Nama Program	Deskripsi Program	Rencana Kegiatan	Milestone				Keterangan
				2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan pertumbuhan industri yang berbasis sumber daya alam dengan memanfaatkan fasilitas kepabeanan	Peningkatan pertumbuhan industri dimaksud guna meningkatkan jumlah penerima fasilitas di Indonesia Timur dan meningkatkan jumlah perdagangan internasional sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur juga meningkat	Updating data industri di wilayah Maluku dan Maluku Utara					
			Sosialisasi terkait pemanfaatan fasilitas kepabeanan dengan stakeholder					
			Koordinasi dengan Sekda Propinsi dan Kab/Kota					
			Koordinasi dengan Dinas terkait yang mengelola/mengawasi Sumber Daya Alam					
			Koordinasi dengan Dinas Perindag tingkat provinsi dan kab/kota					
			Koordinasi dengan badan perencana pembangunan daerah					
			Koordinasi dengan DPM PTSP					
			Asistensi dan pendampingan terhadap perusahaan yang akan mengajukan pemanfaatan fasilitas kepabeanan					

2	Simplifikasi proses bisnis kegiatan ekspor dari Maluku	Simplifikasi proses bisnis kegiatan ekspor dari maluku direncanakan untuk memberikan kemudahan ketersediaan armada kapal dan kontainer ekspor di wilayah kerja Maluku dan mendukung program <i>National Logistics Ecosystems</i>	Pemetaan permasalahan prosedur dan layanan ekspor di masing-masing KPPBC				
			Koordinasi dengan pihak karantina dalam rangka penyederhanaan pemeriksaan barang oleh pihak yang berwenang di pelabuhan dengan memanfaatkan risk engine				
			Koordinasi dengan pihak yang berhubungan dengan transportasi, pelayaran dan kepelabuhanan				
			Koordinasi dengan Dinas Perindag berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Asal				
			Koordinasi dengan Dit Teknis Kepabeanan dalam rangka mencari solusi alternatif masalah ekspor				
			Pengembangan SOP layanan dan pengawasan ekspor				

BAB III

KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1. Kelembagaan

3.1.1 Kedudukan, tugas, fungsi, dan hubungan kerja antara Kanwil DJBC Maluku dan unit kerja di bawahnya

Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016, Kantor Wilayah DJBC merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah memiliki tugas pokok, fungsi, dan hubungan kerja sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Kantor Wilayah DJBC Maluku mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah; pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
7. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
8. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
9. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
10. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

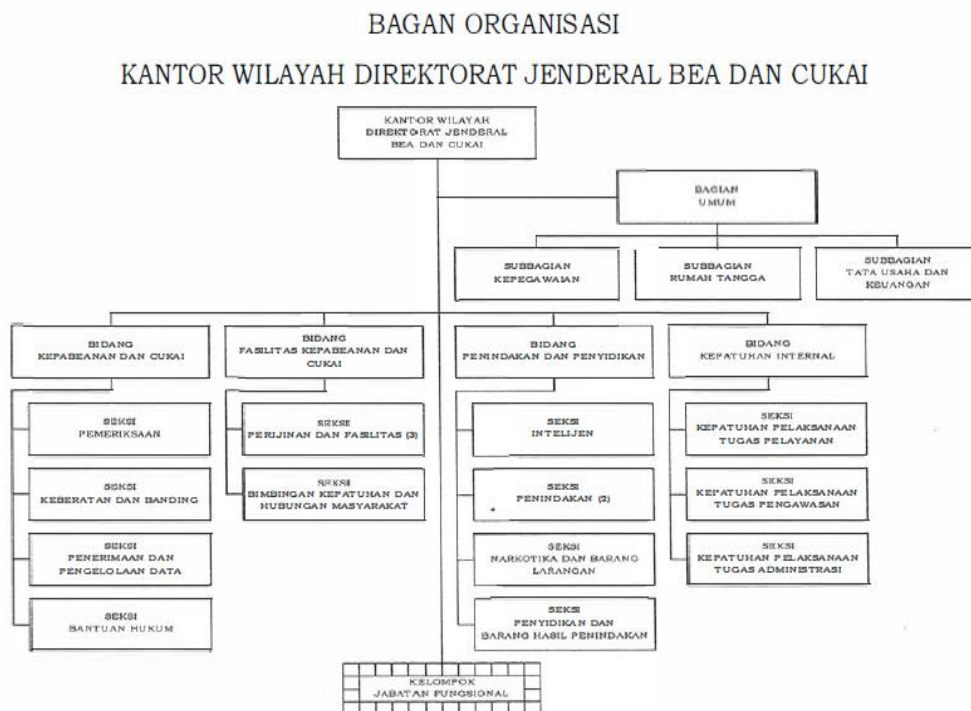
c. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku meliputi dua provinsi yaitu Provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku merupakan wilayah yang memiliki letak geografis pada koordinat 3°9'S 129°23'E dengan luas sekitar 74.505 km persegi, Maluku sendiri terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan dengan persentase sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau sekitar 1.412. Dengan kondisi tersebut Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah Utara, Pulau Sulawesi di sebelah Barat, Papua di sebelah Timur dan Timur Leste ser-ta Laut Arafuru di sebelah Selatan. Provinsi Maluku Utara yang terletak pada koordinat 3° 40' LS- 3° 0' LU 123° 50' - 129° 50' BT dengan luas 140.225 m yang juga merupakan wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Maluku sehingga luas wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Maluku khususnya untuk area perairan membentang sangat luas.

3.1.2 Struktur Organisasi

Kanwil DJBC Maluku adalah satuan kerja eselon II, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah. Di bawahnya terdapat 5 (lima) eselon III yaitu Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan, Bidang Penindakan dan Penyidikan, serta Bidang Kepatuhan Internal

Gambar 3
Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Selain itu Kanwil DJBC Maluku juga membawahi 3 (tiga) satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan (KPPBC) yaitu

- KPPBC TMP C Ambon, membawahi wilayah: Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Bagian Selatan
- KPPBC TMP C Ternate, membawahi seluruh wilayah provinsi Maluku Utara
- KPPBC TMP C Tual, mengawasi wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

3.1.3 Arah Kebijakan Kelembagaan

a. Pembangunan *digital workplace*, inovasi, dan *green office*

Digital workplace merupakan konsep budaya kerja yang mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan konsep *green office* bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas serta menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikandampaknya terhadap lingkungan. Bentuk penerapan *green office* adalah melalui *paperless*, *energy saving*, dan efisiensi *space*, misalnya dengan penggunaan naskah dinas elektronik, efisiensi tenaga listrik, efisiensi penggunaan air baku dan air minum, serta penerapan konsep *activity base workplace*.

Selain itu, seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan juga didorong agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memberikan pelayanan publik yang memuaskan (*faster, better, and cheaper*). Untuk itu DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan perlu menyiapkan mekanisme pengembangan inovasi yang manfaatnya bukan hanya dapat tersampaikan (*sent*), melainkan juga ter-*delivered* ke para *stakeholders*.

Arah kelembagaan dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi. Seiring dengan berbagai perbaikan tambahan dalam mendukung transformasi kelembagaan di lingkungan DJBC, maka dalam rangka menjaga organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien diperlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik.

Adaptasi ini harus beriringan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor vertikal maupun di tingkat kantor pusat DJBC; serta perlu dilakukannya monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

b. Penerapan ruang kerja berbasis *open space*

Untuk mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep atau cara kerja baru yang mengikut perkembangan teknologi digital, Kantor Wilayah DJBC Maluku maupun satuan kerja di bawahnya juga akan menerapkan ruangan kerja yang memakai konsep *open space* agar penggunaan BMN lebih efisien dan efektif. Ruangan kerja berkonsep *open space* diharapkan mampu menghilangkan batasan-batasan fisik, kemudahan komunikasi, mendorong kolaborasi, serta pegawai lebih aktif dan nyaman bekerja. Penerapan konsep *open space*, dapat dilakukan antara lain dengan terdapat *dedicated space*, *locker* untuk setiap pegawai, serta disediakan *pantry*, meja makan, dan meja bar serta ruang publik yang nyaman, seperti studio, perpustakaan, ramah anak, dan laktasi.

c. Pembangunan unit organisasi menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

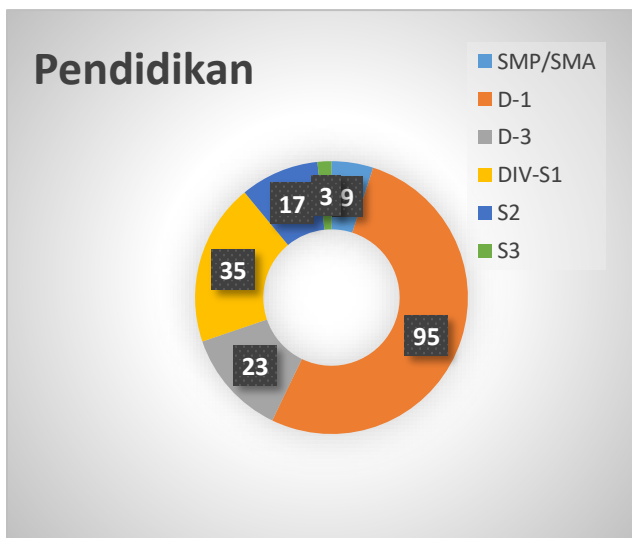
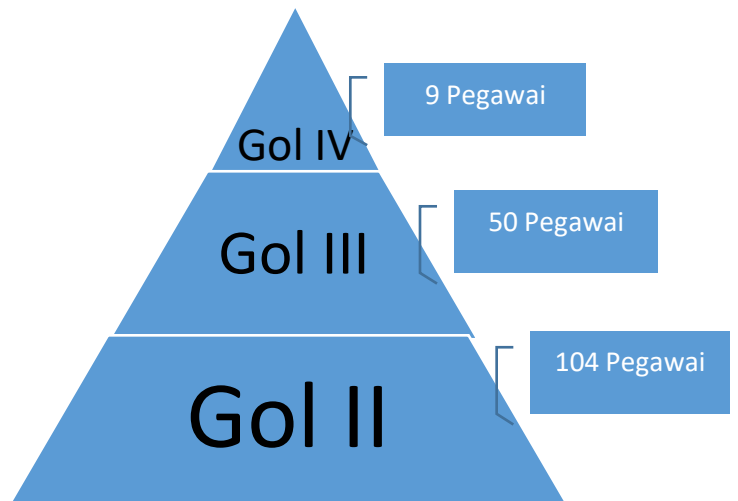
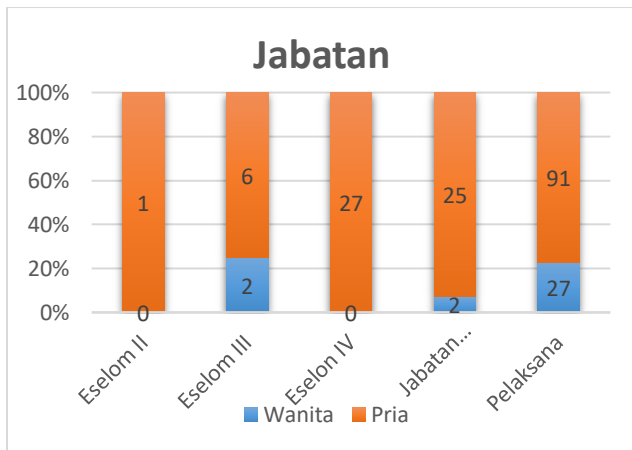
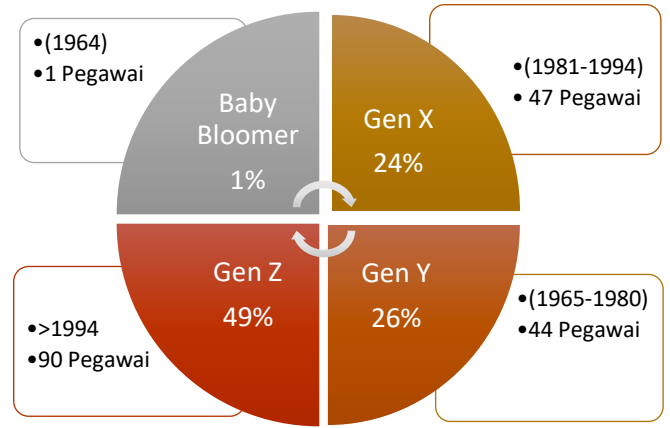
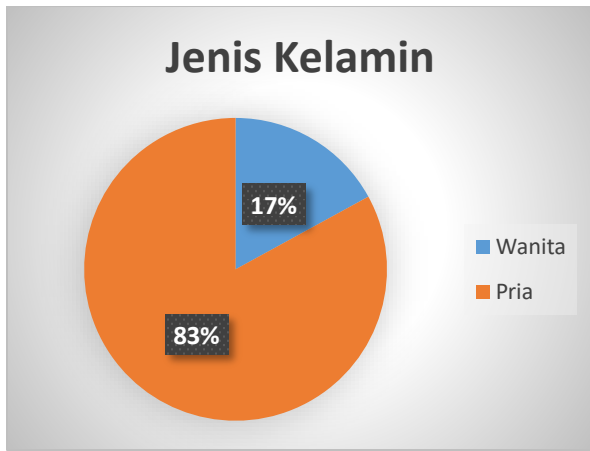
Salah satu arah kebijakan utama Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat adalah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Dalam 5 tahun ke depan, ditargetkan semua stuan kerja di wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku telah memperoleh predikat WBK/WBBM.

1.2. Pengelolaan SDM

a. Kondisi SDM saat ini

Berdasarkan data per tanggal 14 Oktober 2020, Kantor Wilayah DJBC Maluku dan KPPBC dibawahnya dalam menjalankan tugas memiliki jumlah total 182 pegawai termasuk CPNS rekrutmen 2019/2020 yang bekerja di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon, Kantor Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tual dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, gender, genreasi, golongan kepangkatan dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 7
Demografi SDM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku





b. Proyeksi kebutuhan SDM

Berdasarkan data Laporan Analisis Beban Kerja tahun 2019 pada lingkungan unit kerja diseluruh Kantor Wilayah DJBC Maluku terdapat kelebihan jumlah pegawai sebanyak 2 (dua) orang namun disisi lain masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk posisi tertentu baik pada level eselon IV, V dan Pelaksana. Sesuai perkembangan terakhir dimana terdapat mutasi dan delayering jabatan eselon V menjadi jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai maka pada jabatan ex Eselon V yang telah berubah menjadi jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai hanya perlu dilakukan pengaturan penempatan tugas oleh masing masing Kepala Kantor untuk memenuhi kebutuhan SDM masing masing Kantor, sedangkan untuk jabatan Eselon IV yang belum diisi dan Pelaksana, masih perlu dilakukan pengisian kebutuhan SDM sebagaimana tabel berikut :

Tabel Proyeksi Kebutuhan SDM

No.	Satuan Kerja	Eselon IV	Pelaksana			Jumlah
			S1	D3	D1	
1.	Kantor Wilayah DJBC Maluku	3	1	-	-	4
2.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	-	-	1	-	1
3.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	-	-	-	-	-
4.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	1	-	1	-	2
Total		4	1	5	-	10

1.3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan menghadapi tantangan pengawasan ke depan, serta menghadapi perkembangan teknologi yang

melaju pesat, Kantor Wilayah DJBC Maluku selama tahun 2020-2024 berupaya untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana tersebut dibawah.

1.3.1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk Mendukung Proses Pelayanan

Untuk mendukung proses pelayanan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain :

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat baru;
2. Pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah dinas Kanwil DJBC Maluku beralamat di desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
4. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
5. Penyediaan ruang kerja yang memadai dengan menerapkan konsep *flixible working space* dan *open space*;
6. Penyediaan atau modernisasi perangkat kerja berupa komputer, *smartphone*, jaringan, dan peralatan teknologi informasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi;
7. Penyediaan atau revitalisasi ruang pelayanan kepabeanan dan cukai yang nyaman untuk pengguna jasa;
8. Optimalisasi penggunaan aplikasi CEISA serta aplikasi lainnya yang diperlukan;
9. Pendukung sarana kehumasan meliputi kamera Sony, min. a6000/a6300, *Drone* min.Mavic Air/Mavic Mini, Gimbal Dji/Zhiyun, *Extenal Hardisk* (1 Tb), PC dengan spek minimal *proessor* Intel Core i5-8400 dengan RAM 8GB, Laptop dengan spek minimal *proessor* Intel Core i5-8400 dengan RAM 8GB, dan Peralatan *Production Studio*.

1.3.2. Kebutuhan sarana operasi pengawasan

Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan rawan terjadinya pelanggaran karena berbatasan dengan negara tetangga maupun jalur internasional sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Rencana penambahan sarana dan prasana pengawasan yaitu :

1. *speedboat* patroli laut;
2. Komputer/laptop, External Memory, Hidden camera, Alat perekam, GPS tracker dan Binocular untuk keperluan intelijen.

Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan teknik dan modus penyelundupan di bidang kepabeanan maupun cukai, serta adanya perubahan arah kebijakan di level nasional maupun kementerian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penambahan pengajuan sarana dan prasarana pengawasan selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

1.3.3. Kebutuhan pembangunan gedung kantor dan lain-lain

Selain hal-hal tersebut di atas untuk kelancaraan pelaksanaan pekerjaan perlu dilengkapi dengan sarana antara lain:

1. Renovasi/modernisasi gedung kantor serta perlengkapan/peralatan kantor yang mendukung seperti meja dan kursi kerja;
2. Perbaikan/Renovasi rumah dinas yang aman dan nyaman untuk ditempati ;
3. Penataan/renovasi sarana pendukung kerja seperti area parkir, ruang ibadah, ruang pantry, ruang/taman inspirasi, dan sarana olahraga;
4. Penyediaan ruang khusus pemeriksaan dan investigasi sebagai sarana pendukung kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal maupun pemeriksaan eksternal;
5. Penyediaan sarana pendukung seperti ruang laktasi, ruang perpustakaan, dan ruang *display*;
6. Penyediaan sarana transportasi kedinasan dan sarana transportasi pegawai yang memadai untuk mendukung kemudahan bekerja.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

7.1. Target Kinerja

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Kanwil DJBC Maluku padat tahun 2020-2024 akan melaksanakan 3 (tiga) tema atau tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu

- 1) Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif,
- 2) Penerimaan negara yang optimal, dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif						
	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	1. Persentase efektivitas Peningkatan Nilai Ekspor	80%	81%	82%	83%	84%
2	Penerimaan negara yang optimal						
	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,67%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%

		3. Indeks efektivitas komunikasi dan publikasi	82	82	83	84	85
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien						
	Organisasi dan SDM yang optimal	1. Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80,00%	81,50%	81,00%	81,50%	82,00%
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	3. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Kanwil DJBC Maluku pada tahun 2020 melaksanakan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sesuai kelompok penganggaran (sebelum dilakukan redesign penganggaran) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Program | Penerimaan, Pelayanan, dan Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai |
| Sasaran Program | Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang optimal |
| Indikator Sasaran Program | <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan negara yang optimal b. Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai yang efektif c. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif d. Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi e. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai |
| 1. Kegiatan | : Perumusan Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai |
| Sasaran Kegiatan | : Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal |
| Indikator Kegiatan | : <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase kualitas perencanaan satuan kerja b. Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai |
| 2. Kegiatan | : Komunikasi dan Edukasi Kepabeanaan dan Cukai |
| Sasaran Kegiatan | : Komunikasi dan edukasi yang efektif |
| Indikator | : Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi |

- Kegiatan
3. Kegiatan : Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
Sasaran Kegiatan : Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif
Indikator : a. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
Kegiatan : b. Persentase efektivitas patroli laut
 4. Kegiatan : Monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
Sasaran Kegiatan : Pengendalian mutu yang optimal

Indikator : Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
Kegiatan : Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
 5. Kegiatan : Pengelolaan SDM
Sasaran Kegiatan : SDM yang kompeten
Indikator : Persentase peningkatan kompetensi pegawai
Kegiatan
 6. Kegiatan : Pengelolaan organisasi
Sasaran Kegiatan : Organisasi yang *fit for purpose*
Indikator : Persentase efektivitas manajemen organisasi
Kegiatan
 7. Kegiatan : Pengelolaan Anggaran
Sasaran Kegiatan : Pengelolaan keuangan yang optimal
Indikator : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
Kegiatan

Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan redesign penganggaran), Kanwil DJBC Maluku akan menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berdasarkan 5 Program kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Kep-198/BC/2020. Adapun rincian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Kanwil DJBC Maluku adalah sebagai berikut:

1. Program : Pengelolaan Penerimaan Negara
Sasaran Program : Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
Indikator Kinerja Program : a. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
b. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
c. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
d. Indeks efektivitas komunikasi dan publikasi
2. Program : Dukungan Manajemen
Sasaran Program 1 : Organisasi dan SDM yang optimal
Indikator Kinerja Program 1 : Indeks kepuasan pengguna layanan

Sasaran Program 2 : Pengelolaan organisasi yang optimal dan akuntabel
 Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut temuan APF
 Program 2

Sasaran Program 3 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal
 Indikator Kinerja : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
 Program 3

7.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Kanwil DJBC Maluku yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kanwil DJBC Maluku sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kerangka Pendanaan Tahun 2020

No	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Setelah Refocusing Anggaran
1	Komunikasi dan Edukasi Kepabeanaan dan Cukai	212.204.000
2	Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	358.660.000
3	Pengelolaan SDM	3.733.190.000
4	Pengelolaan organisasi	4.873.261.000
5	Pengelolaan Anggaran	142.770.000
Total		9.320.085.000

*dalam rupiah

Kerangka pendanaan pada tahun 2020 dibuat menggunakan format kerangka pendanaan lama dengan memakai 12 program (money follow program). Sementara itu untuk tahun 2021 akan dimulai pengimplementasian redesign sistem penganggaran di semua K/L. Restrukturisasi 12 program Kemenkeu menjadi 5 program bertujuan untuk menajamkan fokus program yang lebih koheren antar unit eselon I dan impact-nya massif. Redesign sistem penganggaran dilakukan melalui simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran sehingga level struktur anggaran menjadi lebih ringkas. Melalui simplifikasi dimaksud diharapkan penyusunan anggaran yang sederhana sehingga pelaksanaan anggaran semakin fleksibel.

Dengan redesign ini, jumlah program hasil redesign akan menjadi lebih sedikit namun lebih fokus, tidak sebanyak jumlah Program existing 12 (dua belas) sesuai dengan jumlah unit eselon I. Restrukturisasi program dimaksud juga memisahkan antara program yang bersifat teknis (Program Teknis) dengan program yang bersifat sebagai dukungan (Program Dukungan Manajemen). Penggabungan program pada sistem penganggaran mendorong unit eselon I untuk saling bersinergi dalam pencapaian sasaran dan mendukung tujuan nasional tanpa dibatasi oleh perbedaan unit Organisasi.

Berikut merupakan tabel proyeksi kerangka pendanaan Kanwil DJBC Maluku setelah redesign anggaran tahun 2021-2024:

Tabel 4.3
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024
(Setelah Redesign Penganggaran)

No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	941.112.000	957.110.904	973.381.789	989.929.279
2	Program Dukungan Manajemen	9.820.200.000	9.987.143.400	10.156.924.837	10.329.592.560
Total Pagu		10.760.312.000	10.760.312.000	10.944.254.304	11.130.306.626

*dalam rupiah

Kerangka Pendanaan Kanwil DJBC Maluku tahun 2020 s.d 2024 relatif mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya peningkatan implementasi program-program strategis yang memerlukan dukungan pendanaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kontribusi Kanwil DJBC Maluku dalam beberapa program strategis DJBC yang akan dimulai implementasinya pada tahun 2020 dan 2021, sehingga secara belanja modal akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Beberapa kontribusi DJBC yang tercantum dalam program RPJMN yaitu seperti *National Logistic Ecosystem*, *Smart Customs and Excise*, peningkatan energi baru terbarukan (EBT), peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dengan cara mendukung pengembangan KEK, meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat melalui peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap, peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi, optimalisasi kebijakan luar negeri (pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional), dan penjagaan stabilitas keamanan nasional (penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba). Kontribusi Kanwil DJBC Maluku dalam beberapa program tersebut memerlukan pendanaan dalam pengimplementasiannya untuk memenuhi sarana dan prasana yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kanwil DJBC Maluku Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan ke dalam tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kanwil DJBC Maluku dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan visi Kementerian keuangan yaitu "Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" selama lima tahun ke depan, serta visi dan misi DJBC.

Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kanwil DJBC Maluku serta KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Maluku.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
NOMOR KEP-63/WBC.19/2020
TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS
KANWIL DJBC MALUKU TAHUN 2020-2024

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2021-2024**

Uraian	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja (IK)	Target				Indikasi Pendanaan			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KANWIL DJBC MALUKU						10.761.312.000	10.944.254.304	11.130.306.626	11.319.521.840
PROGRAM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA						941.112.000	957.110.904	973.381.789	989.929.279
Sasaran Program	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal								
Indikator Program	a. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100%	100%	100%				
	b. Indeks efektivitas komunikasi dan publikasi	82	83	84	85				
	c. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%				
	d. Persentase efektivitas	81,00 %	82,00 %	83,00 %	84,00 %				

	Peningkatan Nilai Ekspor								
Kegiatan 1	Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi di Bidang Penerimaan Negara					313.800.000	319.134.600	324.559.888	330.077.406
Sasaran Kegiatan 1	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara								
Kegiatan 2	Pengawasan dan Penegakan Hukum					627.312.000	637.976.304	648.821.901	659.851.873
Sasaran Kegiatan 2	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif								
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						9.820.200.000	9.987.143.400	10.156.924.837	10.329.592.560
Sasaran Program	Organisasi dan SDM yang optimal								
Indikator Program	a. Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)				
	b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,20 %	95,50 %	95,70 %	96,00 %				
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi					6.056.118.000	6.159.072.006	6.263.776.230	6.370.260.426
Sasaran Kegiatan 1	Organisasi yang berkinerja tinggi								
Kegiatan 2	Pengelolaan SDM					3.603.402.000	3.664.659.834	3.726.959.051	3.790.317.355
Sasaran Kegiatan 2	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi								
Kegiatan 3	Pengelolaan Anggaran					160.680.000	163.411.560	166.189.557	169.014.779
Sasaran Kegiatan 3	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel								

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
NOMOR : KEP- /WBC.19/2020 TENTANG DOKUMEN
PERENCANAAN STRATEGIS KANWIL DJBC MALUKU
TAHUN 2020-2024

ANALISIS SWOT KANWIL DJBC MALUKU

1. Bidang Kepabeanan dan Cukai :

Strength	Weakness
<p>1. Man : Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan Perencanaan Distribusi Target Penerimaan masing – masing satuan kerja dilakukan secara cermat dan sistematis.</p> <p>2. Money : -</p> <p>3. Machine : Ketersediaan Virtual Private Network (VPN) yang memiliki kapasitas besar dan memadai dalam mendukung akses aplikasi dalam rangka pelaksanaan <i>Flexible Working Space</i> (FWS).</p> <p>4. Method : -</p> <p>5. Information : Tersedianya data dan informasi terkait Pemutakhiran data barang impor melalui pengelolaan profil Database Nilai Pabean II.</p> <p>6. System :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya system aplikasi Pengelolaan monitoring dan evaluasi data realisasi penerimaan, penyelesaian piutang dan devisa ekspor – impor melalui Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP);b. Tersedianya sistem Pengelolaan monitoring atas pengajuan keberatan dan banding melalui SIAP	<p>1. Man : Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian teknis di bidang Audit belum memadai jumlahnya.</p> <p>2. Money : -</p> <p>3. Machine : -</p> <p>4. Method : -</p> <p>5. Information : Belum terintegrasinya informasi dari pemangku kepentingan yang dibutuhkan dalam keterkaitan penerbitan legalitas atas izin pengusaha di bidang cukai.</p> <p>6. System : -</p>

Tanding.	
<p>Opportunity</p> <p>1. Market/ Stakeholder : -</p> <p>2. Domestik:</p> <p>a. Dapat mencapai target dari perencanaan penerimaan dalam bidang kepabeanan dan cukai pada tahun berjalan;</p> <p>b. Mampu menganalisa progress pencapaian target penerimaan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya (SAPP);</p> <p>c. Melakukan kegiatan penelitian ulang atas nilai pabean, tarif dan klasifikasi barang impor secara tepat</p> <p>d. Proyek pembangunan blok Masela memasuki masa konstruksi pada tahun 2022.</p> <p>3. Nasional : Adanya rencana implementasi kebijakan NLE (<i>National Logistic Ecosystem</i>).</p> <p>4. Internasional : -</p> <p>5. Lain-lain -</p>	<p>Threat</p> <p>1. Market/ Stakeholder :</p> <p>a. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait standarisasi proses penanganan barang impor di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku;</p> <p>b. Kurang optimalnya pemantauan dan pelayanan terhadap perijinan pengusaha di bidang kepabeanan dan cukai;</p> <p>c. Tingkat kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan masih kurang.</p> <p>2. Domestik :</p> <p>a. Tidak terpenuhinya target DROA yang telah direncanakan pada tahun berjalan dikarenakan kurangnya dukungan SDM auditor;</p> <p>b. Adanya perusahaan penerima fasilitas sehingga menurunkan potensi penerimaan.</p> <p>3. Nasional :</p> <p>a. Masih adanya barang impor yang diselesaikan kewajiban kepabeanannya di luar wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku dikarenakan kurangnya dukungan logistik;</p> <p>b. Lokasi perusahaan yang dilakukan penelitian ulang tidak di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku;</p> <p>c. Biaya transportasi mahal.</p> <p>4. Internasional : -</p> <p>5. Lain-lain : -</p>

Strategi Bidang Kepabeanan dan Cukai :

No	Strategi	Program	Hubungan dengan SWOT
1	Tujuan Penerimaan negara yang optimal		
1.1	Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai	a. Optimalisasi Virtual Private Network (VPN) yang memiliki kapasitas besar dan memadai dalam mendukung akses aplikasi b. Optimalisasi system aplikasi Pengelolaan monitoring dan evaluasi data realisasi penerimaan, penyelesaian piutang dan devisa ekspor – impor melalui Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP); c. Optimalisasi sistem Pengelolaan monitoring atas pengajuan keberatan dan banding melalui SIAP Tanding.	Penguatan Strength 3, 6a-b
1.2	Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai	a. Optimalisasi SDM yang mampu melakukan Perencanaan Distribusi Target Penerimaan masing – masing satuan kerja dilakukan secara cermat dan sistematis. b. Melakukan kegiatan penelitian ulang atas nilai pabean, tarif dan klasifikasi barang impor secara tepat	Penguatan Strength 1, 5 Penguatan Opportunity 2a-c Antisipasi Threat 1c, 2b
1.3	Penguatan kelembagaan penerimaan negara	Melakukan persiapan implementasi kebijakan NLE (<i>National Logistic Ecosystem</i>).	Penanganan Weakness 5 Penguatan Opportunity 3, 2d Antisipasi Threat 1a-b, 3a-c
1.4	Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai	Meningkatkan dukungan SDM dalam mencapai target DROA yang telah direncanakan	- Penanganan Weakness 1 - Antisipasi Threat 2a

2. Bidang Penindakan dan Penyidikan :

Strength	Weakness
<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sumber Daya Manusia pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku memiliki banyak pegawai <i>milenial</i> yang handal dan memiliki potensi yang baik dalam melakukan pengawasan; kepabeanaan dan cukai;b. Pimpinan memiliki komitmen, semangat dan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan pengawasan yang optimal di bidang kepabeanaan dan cukai;c. Kemampuan pegawai di bidang pengawasan yang kompeten dan terampil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. <p>2. Money : Terdapat dukungan anggaran pengawasan yang memadai pada DIPA dan DOKPPN.</p> <p>3. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Struktur unit Penindakan dan Penyidikan telah ada di Kanwil maupun KPPBC;b. Telah tersedianya perangkat komputer dan jaringan internet sebagai Peralatan kerja utama. <p>4. Method : Peraturan tentang tata laksana pengawasan berupa Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan yang dijadikan panduan bagi pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan.</p>	<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sumber Daya Manusia pada Kanwil DJBC Maluku memiliki banyak pegawai <i>millenial</i> yang handal dalam kepabeanaan dan cukai, namun masih mengalami kendala untuk memperoleh pelatihan baik melalui diklat maupun mengundang narasumber yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis mereka dalam pelaksanaan tugas di lapangan;b. Kurangnya kompetensi pegawai Kanwil di bidang intelijen dalam hal pengumpulan, pengolahan dan analisa data intelijen. <p>2. Money : -</p> <p>3. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kondisi sarana dan prasarana kantor yang belum mendukung situasi kerja New Normal dan <i>Flexible Working Space</i> (FWS) berupa ruangan, komputer/Laptop dan internet;b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai; belum tersedia (<i>Speedboat</i>) sebagai sarana pengawasan sehingga sulit menjangkau titik-titik pengawasan/rawan. <p>4. Method : Belum adanya database informasi yang terintegrasi</p>

<p>5. Information : Memiliki <i>database</i> pengawasan (intelijen) yang <i>up to date</i> terkait kegiatan impor, ekspor dan cukai di wilayah Maluku.</p> <p>6. System :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat <i>system</i> aplikasi pendukung kinerja pegawai unit pengawasan seperti CEISA, EXSIS dan CITAC yang berlaku secara nasional; b. Terdapat sistem monitoring pergerakan kapal seperti (AIS, <i>marinetraffic</i>, dan <i>Vessel Finder</i>) yang mampu mendeteksi keberadaan kapal di perairan Maluku secara <i>real time</i>; c. Terdapat Aplikasi Penindakan berupa <i>website</i> (<i>apppenindakan.net</i>) sebagai <i>Pass Record</i> pelanggaran yang dilakukan oleh unit penindakan, sehingga dapat digunakan untuk <i>Post Seizure Analysis</i>; d. Terdapat aplikasi peta kerawanan yang dikembangkan oleh pegawai Kanwil DJBC Maluku berupa link dalam <i>gdrive</i> yang digunakan untuk <i>Pass Record</i> pelanggaran yang dilakukan oleh unit penindakan, sehingga dapat digunakan untuk <i>Post Seizure Analysis</i>. 	<p>5. Information :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum terotomasi secara langsung b. belum adanya metode sharing informasi yang terotomasi antara Kanwil dengan KPPBC untuk memenuhi kebutuhan user (<i>user friendly</i>). <p>6. System :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat akses untuk melakukan penarikan data dari aplikasi CEISA, EXSIS dan CITAC. (koordinasi dengan kantor pusat terkait Tableau); b. Belum ter-updatenya aplikasi peta kerawanan.
<p>Opportunity :</p> <p>1. Market/ Stake holder:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi yang cukup baik antar aparat penegak hukum dalam rangka menunjang tugas pengawasan Kepabeanan dan Cukai; b. Komunikasi yang baik dengan pengguna jasa dan <i>stakeholder</i>. 	<p>Threat :</p> <p>1. Market/ Stakeholder: Pengguna jasa dan <i>stakeholder</i> yang belum patuh terhadap kewajiban pencatatan dan pelaporan terutama di bidang cukai.</p> <p>2. Domestik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Geografis wilayah pengawasan wilayah Kanwil

<p>2. Domestik : Pengguna jasa di wilayah Kanwil DJBC Maluku sudah patuh dalam melakukan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Lain-lain : Teknologi informasi saat ini memungkinkan untuk membuat system aplikasi pengawasan yang memadai.</p>	<p>DJBC Maluku yang terdiri laut, darat dan pulau-pulau serta berbatasan dengan negara lain</p> <p>b. Banyaknya pintu masuk perbatasan laut serta perairan pelabuhan antar pulau, yang belum sepenuhnya dapat diawasi oleh pegawai</p> <p>c. Kondisi cuaca buruk dan tinggi gelombang menjadi faktor penghambat utama dalam melakukan patroli laut karena kapal yang digunakan tidak dapat menghadapi kondisi tersebut</p> <p>3. Lain-lain : -</p>
--	---

Strategi Bidang Penindakan dan Penyidikan :

No	Strategi	Program Kerja	Hubungan dengan SWOT
1. Perlindungan Masyarakat terhadap peredaran barang-barang berbahaya dan/atau Ilegal			
1.1	Peningkatan fungsi pada unit-unit pengawasan dalam rangka optimalisasi pengawasan kepabeanaan dan cukai	<p>a. Pembangunan sistem aplikasi pengawasan yang terintegrasi antara unit pengawasan Kanwil dengan unit pengawasan KPPBC yang bersifat <i>user friendly</i>;</p> <p>b. Memperkuat <i>database</i> informasi dan pengawasan;</p> <p>c. Membuat system input informasi kerawanan dan membangun konseptual <i>system</i> informasi dalam waktu 3 bulan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 5 - Penguatan Opportunity 3 - Penanganan Weakness 4 dan 5 - Antisipasi Treat 2.b-c
		<p>Peningkatan pengawasan barang-barang illegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor, ekspor serta peredaran barang kena cukai Ilegal dengan meningkatkan jaringan koordinasi dengan unit pengawasan di KPPBC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 1.a-b, 4 - Penguatan Opportunity 1.b, 2.a - Penanganan Weakness 1, 4, dan 6

			- Antisipasi Treat 2.a-c
		a. Peningkatan pengawasan keamanan laut dengan menggunakan sistem teknologi informasi (AIS, Marrine Traffic, dll) serta sinergi dengan instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan keamanan laut b. Peningkatan penggunaan sistem TIK untuk menunjang terlaksananya pengawasan yang optimal	- Penguatan Strength 1.a-b, 6.b - Penguatan Opportunity 1.a - Penanganan Weakness 1, 3.b - Antisipasi Treat 2.a-c
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Penyidik dan/atau Administrasi Penyidikan dengan Pengusulan Diklat atau Pelatihan di bidang penyidikan kepabeanaan dan cukai.	- Penguatan di strength 1.a, 3.a - Penguatan Opportunity 1.a - Penanganan Weakness 1. - Antisipasi Treat 2.a
		Melakukan Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan peredaran gelap NPP di wilayah Maluku dan Maluku Utara.	- Penguatan Strength 1 - Penguatan Opportunity 1.a - Antisipasi Treat 2.a
1.2	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa	Koordinasi dengan kehumasan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jasa secara massif setiap tahun.	- Penguatan Strength 1.a-b - Penguatan Opportunity 1.b, 2.a - Antisipasi Treat 1.a
		Melakukan <i>targetting</i> terhadap pengguna jasa yang belum memenuhi ketentuan aturan yang berlaku.	- Penguatan Strength 1.a-b - Antisipasi Treat 1.a

3. Bagian Umum :

Strength 1. <i>Man</i> :	Weakness 1. <i>Man</i> :
------------------------------------	------------------------------------

<p>Terdapat pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan atau telah berpengalaman melaksanakan tugas administrasi, teknis kepabeanaan dan cukai untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan tugas melalui diklat/pelatihan, dan <i>sharing knowledge</i> ke seluruh pegawai.</p> <p>2. Money : Tersedia Alokasi Anggaran untuk tahun 2020 dan 2021 di atas Rp. 10 milyar untuk program Pengelolaan penerimaan Negara dan Dukungan Manajemen.</p> <p>3. Machine : a. Telah tersedia <i>Flexible Working Space</i> Ruang Kantor; b. Perlengkapan kantor cukup memadai.</p> <p>4. Methode : Terdapat peraturan yang memadai terkait kepegawaian, keuangan dan BMN.</p> <p>5. Information : Telah tersedia saluran penyampaian informasi melalui aplikasi NADINE dan WA <i>group</i>.</p> <p>6. System : Tersedia Program pendukung kinerja seperti Nadine, Cehris, HRIS Kemenkeu, E-Performance, SAKTI, Om-SPAN, SatuDJA, GPP, SIMAN, aplikasi Zoom berbayar dan <i>cloud system</i> pendukung.</p>	<p>a. Sumber Daya Manusia pada Kanwil DJBC Maluku memiliki banyak pegawai <i>millenial</i> yang handal dalam kepabeanaan dan cukai, namun masih mengalami kendala untuk memperoleh pelatihan baik melalui diklat maupun mengundang narasumber (internal Kanwil DJBC Maluku maupun Eksternal) yang dapat meningkatkan pengetahuandan kemampuan teknis mereka dalam pelaksanaan tugas di lapangan;</p> <p>b. Berdasarkan ABK, Kantor Wilayah DJBC Maluku memiliki kelebihan pegawai.</p> <p>2. Money : -</p> <p>3. Machine : a. Rumah dinas dalam kondisi kurang layak huni dan jumlah kurang mencukupi; b. Komputer/laptop banyak dalam kondisi rusak/tidak dapat beroperasi; c. Kendaraan dinas roda 2 belum mencukupi.</p> <p>4. Methode : -</p> <p>5. Information : -</p> <p>6. System : Stabilitas koneksi jaringan dan <i>Bug</i> pada aplikasi program pendukung kinerja.</p>
<p>Opportunity : 1. Market/ Stake Holder Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan <i>Stakeholder</i> terutama di Lingkungan Kementerian</p>	<p>Threat 1. Market/ Stakeholder - 2. Domestik : a. Masih jarang nya pegawai</p>

<p>Keuangan.</p> <p>2. Domestik : Banyak penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, <i>training-retraining</i>, dan internalisasi pengetahuan kepabeanan dan cukai serta pengetahuan pendukung yang dapat diikuti pegawai Kanwil DJBC Maluku secara daring.</p> <p>3. Nasional : Koordinasi yang baik antara Kantor Pusat- Kantor Wilayah- KPPBC yang dapat memudahkan mencapai hasil kinerja yang diharapkan.</p> <p>4. Internasional : -</p> <p>5. Lain-lain :</p> <p>a. Dana renovasi rumah dinas sudah tersedia, dan kegiatan renovasi akan dimulai tahun 2021;</p> <p>b. <i>Dropping</i> laptop dari kantor pusat pada tahun 2021.</p>	<p>dilingkungan Kanwil DJBC Maluku yang mendapat panggilan diklat teknis kepabeanan dan cukai dari Kantor Pusat DJBC;</p> <p>b. Supervisi dan bimbingan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dari satker kanwil maupun kantor pelayanan di lingkungan Kanwil DJBC Maluku;</p> <p>c. Kesulitan pencapaian IKPA (IKU Presentase kualitas pelaksanaan anggaran).</p> <p>3. Nasional : -</p> <p>4. Internasional : -</p> <p>5. Lain-lain :</p> <p>a. <i>Money follows program</i>, perlu perencanaan anggaran yang visioner dan perubahan yang adaptif menyesuaikan program kerja bidang;</p> <p>b. Ruang yang tersedia terbatas, sehingga belum dapat memenuhi ruang kerja berdasarkan ABW, diantaranya ruangan untuk layanan pengguna jasa dan ruang penyidikan;</p> <p>c. Belum adanya teknisi handal di Kota Ambon yang dapat memperbaiki laptop/komputer.</p>
--	---

Strategi Bagian Umum :

No	Strategi	Program Kerja	Hubungan dengan SWOT
1.	Pengelolaan Keuangan yang berkualitas dan selaras dengan <i>redesign</i>	a. Menerapkan <i>Self Assessment</i> Pengelolaan Anggaran yang akuntabel secara triwulanan;	- Penguatan Strength 2, 4, 5, 6 - Pemanfaatan Opportunity 3 - Penanganan

	penganggaran	<p>b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja satker DJBC;</p> <p>c. Melakukan mitigasi resiko dan pemantauan terhadap belanja modal;</p> <p>d. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan Verifikasi dan penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W;</p> <p>e. Monitoring, validasi transaksi aset dan keuangan, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan.</p>	<p>Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antisipasi Treat2 B,C ; 5 A
2.	Modernisasi arsip Kanwil DJBC Maluku	Digitalisasi Arsip dan membangun sistem.	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 6
3.	Penguatan Budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	<p>a. Penyusunan formulir kegiatan / pekerjaan masing masing pegawai;</p> <p>b. Penempatan dan kesesuaian jumlah pegawai pada masing masing satker sesuai hasil ABK;</p> <p>c. Berkoordinasi dengan seluruh bidang di kanwil dan kantor vertikal terkait untuk melakukan pelatihan terhadap seluruh pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dengan pembicara internal kanwil Maluku, ditambah kelas leadership untuk pejabat promosi eselon IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 1,4, 5, 6 - Pemanfaatan Opportunity 2,3 - Penanganan Weakness 1 a,b, 6 - Antisipasi Treat 2 A
4.	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	Mengupayakan dan menyiapkan seluruh peralatan dan fasilitas kantor lainnya guna menunjang kinerja pegawai, disertai administrasi yang baik terhadap pengelolaan barang tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 3,6 - Pemanfaatan Opportunity 3, 5A,B - Penanganan Weakness 3 A,B,C ; 6 - Antisipasi Treat 5 B,C

4. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai :

Strength	Weakness
<p>1. Man : Motivasi pegawai masih tinggi pada periode dua tahun pertama penugasan.</p> <p>2. Money : Terdapat dukungan anggaran kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pada DIPA (<i>Money Follows Program</i>).</p> <p>3. Machine :</p> <p>4. Method :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terdapat regulasi yang jelas mengenai fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai sebagai acuan pelaksanaan tugas;b. Terdapat panduan internal, seperti Peraturan Direktur Jenderal yang menjadi SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. <p>5. Information :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Forum kehumasan yang telah terbangun dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas kehumasan;b. Kantor Wilayah telah memiliki laman resmi dan media sosial yang dikelola secara mandiri. <p>6. System :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Organisasi memiliki sistem pengolahan data internal seperti EIS, CEISA 4.0, dan Tableau Server yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah;b. Telah ada sistem penyampaian informasi kehumasan KETAPEL untuk mendukung kinerja	<p>4. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pegawai belum memiliki kemampuan Analisa data yang memadai;b. Pemahaman pegawai akan dampak ekonomi dari pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai masih rendah. <p>5. Money : -</p> <p>6. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peralatan kerja yang tersedia sangat minim, baik dari sisi kuantitas dan kualitas. (laptop, kamera, <i>drone</i>, alat production studio, mobil kehumasan, printer);b. Belum terdapat infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan kehumasan dalam <i>platform</i> digital. <p>7. Method :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Supervisi konten berita pada media lokal, nasional, dan media sosial.b. Terdapat perbedaan pemahaman dalam implementasi regulasi. <p>8. Information :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laman resmi dan dokumentasi kegiatan belum dikelola dengan baik;b. Akses terhadap data yang disediakan oleh Organisasi (Kantor Pusat) dalam rangka analisa kinerja ekspor, impor, dan fasilitas belum dapat diakses. <p>9. System : Sistem/mekanisme pertukaran informasi/data dengan instansi terkait (eksternal) belum terbentuk.</p>

kehumasan.	
<p>Opportunity :</p> <p>1. Market/ Stakeholder :</p> <p>a. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> telah terjalin dengan baik</p> <p>b. Jumlah industri yang dibimbing untuk menerima fasilitas kepabeanan relatif sedikit</p> <p>2. Domestik :</p> <p>Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait pada wilayah Maluku telah terjalin dengan baik</p> <p>3. Nasional :</p> <p>a. Akses terhadap data yang disediakan Organisasi (Kantor Pusat) terbuka bagi Satuan Kerja yang ingin memanfaatkan;</p> <p>b. Unit Pengembangan SDM memiliki program peningkatan kompetensi pegawai yang terbuka sepanjang tahun berdasarkan pengusulan;</p> <p>c. Terbukanya saluran komunikasi dan konsultasi dengan Kantor Pusat DJBC.</p> <p>4. Internasional :</p> <p>5. Lain-lain :</p>	<p>Threat :</p> <p>1. Market/ Stakeholder :</p> <p>a. Pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan cukai ;</p> <p>b. Masyarakat/Pelaku usaha tidak memperoleh informasi terkait kepabeanan dan cukai yang akurat.</p> <p>2. Domestik :</p> <p>Pegawai belum memiliki pemahaman yang sama terhadap dampak ekonomi fasilitas kepabeanan dan cukai.</p> <p>3. Nasional :</p> <p>4. Internasional :</p>

Strategi Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai :

No	Strategi	Program Kerja	Hubungan dengan SWOT
1.	Dukungan ekonomi melalui fasilitas kepabeanan dan cukai di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	<p>a. Bimbingan Teknis/P2KP untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap dampak ekonomi pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai;</p> <p>b. Pengadaan alat kerja</p>	<p>Penguatan <i>Weakness</i> 1.b; Antisipasi <i>Threat</i> 2</p> <p>Penguatan</p>

		<p>(komputer, <i>printer</i>, <i>drone</i>, alat studio produksi, dan mobil kehumasan);</p> <p>c. Konsultasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman internal dan <i>stakeholder</i> terkait implementasi fasilitas kepebeanaan dan cukai;</p> <p>d. Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pertukaran Informasi/Data melalui Perjanjian Kerja Sama (MoU) pertukaran data dengan instansi terkait;</p> <p>e. Penyediaan akses terhadap data yang tersedia di Kantor Pusat</p>	<p><i>Weakness</i> 3.a-b</p> <p>Penguatan <i>Weakness</i> 4.b; Pemanfaatan <i>Opportunity</i> 1, 2.a, 3.c; Antisipasi <i>Threat</i> 1.a</p> <p>Penguatan <i>Weakness</i> 6; Pemanfaatan <i>Opportunity</i> 3.a</p> <p>Penguatan <i>Strength</i> 6.a; Penguatan <i>Weakness</i> 5.b; Pemanfaatan <i>Opportunity</i> 3.a</p>
2.	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional	Optimalisasi laman resmi dan media sosial serta manajemen dokumentasi Kantor Wilayah dan Satker di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku	Penguatan <i>Weakness</i> 5.a; Penguatan <i>Opportunity</i> 1.a; Antisipasi <i>Threat</i> 1.b,
3.	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga	<p>a. Pengembangan <i>negative list</i> dan monitoring-evaluasi konten pada satuan kerja</p> <p>b. Sosialisasi fasilitas kepebeanaan dan cukai</p>	<p>Penguatan <i>Weakness</i> 4.a; Antisipasi <i>Threat</i> 1.b,</p> <p>Pemanfaatan <i>Opportunity</i> 1.a; Antisipasi <i>Threat</i> 1.a</p>

5. Bidang Kepatuhan Internal :

Strength	Weakness
<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pegawai Kanwil dan KPPBC telah memiliki semangat, kompetensi, kinerja, dan integritas yang baik;b. Jajaran Pimpinan memiliki semangat dan komitmen yang sangat baik terhadap kinerja, integritas serta pembinaan pegawai. <p>2. Money :</p> <p>Terdapat dukungan anggaran pada DIPA.</p> <p>3. Machine :</p> <p>Struktur UKI telah ada di Kanwil maupun KPPBC.</p> <p>4. Methode :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan tentang pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal;b. Terdapat metode kerja UKI seperti: Pengelolaan kinerja, PPI, PKPT, Evaluasi IKU, Sidak, Penilaian K3;c. Koordinasi UKI yang baik antara Kantor Pusat – Kanwil – KPPBC. <p>5. Information :</p> <p>Data dan informasi kinerja serta kepatuhan internal dari KPPBC dan Kanwil telah dikumpulkan, diolah, dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6. System :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Telah ada sistem pendukung kinerja pegawai seperti CEHRIS, CEISA yang berlaku secara nasional, dan beberapa aplikasi lokal di Kanwil dan KPPBC;b. Telah ada sistem pendukung kepatuhan internal seperti E-Performance, Cehris, Super Simple, dll;c. Sistem pengawasan kepatuhan lini 1, 2 dan 3 telah berjalan.	<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Banyak pegawai yang telah lama bertugas dalam satu Kanwil/KPPBC dan harus dimotivasi dan dikawal dalam pencapaian kinerja yang baik;b. Pegawai yang telah mengikuti diklat atau pelatihan UKI jumlahnya belum memadai. <p>2. Money :</p> <p>-</p> <p>3. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peralatan kerja berupa komputer untuk pekerjaan UKI sering rusak, banyak yang perlu perbaikan dan peningkatan spesifikasi;b. Masih terdapat perlengkapan yang belum ada misalnya CCTV;c. Ruang kerja belum dilengkapi dengan ruang pemeriksaan. <p>4. Methode</p> <p>Metode pengawasan kepatuhan pegawai yang melaksanakan tugas di pulau luar relatif masih belum maksimal.</p> <p>5. Information :</p> <p>Masih terdapat informasi kepatuhan internal belum lengkap seperti kondisi tugas di luar pulau, profil perusahaan, kegiatan di pos pengawasan, dll.</p>

Opportunity	Threat
<p>1. Market/ Stakeholder :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemotretan ABK yang tepat serta mengoptimalkan kinerja pejabat fungsional PBC Pertama/Muda/Madya; b. Pemahaman pengguna jasa sudah tinggi bahwa Bea Cukai sudah baik. <p>2. Domestic</p> <p>3. k :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja bea dan cukai yang diakui secara domestik, dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional; b. Pembinaan pegawai menjadi teladan tingkat wilayah maupun nasional dengan peningkatan integritas, dan kinerja. <p>4. National :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan zona integritas dan mendapatkan pengakuan berupa predikat WBK/WBBM, KWT; b. Terdapat peluang kerjasama upaya peningkatan kepatuhan internal dan peningkatan kinerja dengan pihak lain seperti KPK, Itjen, Dit KI, Pemprov, Kejati, Polda, Ombudsman, Kampus. <p>4. International : -</p> <p>5. Lain-lain : Pemakaian TIK untuk peningkatan kepatuhan internal.</p>	<p>1. Market/ Stakeholder :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Godaan pelanggaran integritas terhadap pegawai masih ada; b. Kinerja dalam penerapan metode kerja FWS tidak optimal. <p>2. Domestik :</p> <p>3. National :</p> <p>4. International :</p>

Strategi Bidang Kepatuhan Internal :

No	Strategi	Program Kerja	Hubungan dengan SWOT
1	Pengendalian dan pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai b. Penegakan Kepatuhan Internal c. Pemanfaatan Sistem dan Infrastruktur Kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan weakness 1a, 4.a-c - Penguatan opportunity 1.a - Antisipasi

		Internal	Treat 1
2	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delay ering kelembagaan organisasi	<p>a. Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC.</p> <p>b. Analisis beban kerja untuk efektivitas penempatan Pejabat Fungsional seluruh satker di Kanwil DJBC Maluku</p> <p>c. Penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis pada Pejabat Fungsional KPPBC TMP C pada Kanwil DJBC Maluku</p>	<p>- Penguatan Strength 1 dan 3</p> <p>- Penguatan opportunity 3</p>
3	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	<p>a. Edukasi, pelatihan, atau Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal dengan narasumber internal maupun eksternal</p> <p>b. Penyelenggaraan edukasi pengguna jasa dan <i>stakeholder</i> tentang anti korupsi, gratifikasi, penanganan konflik kepentingan, dll</p>	<p>- Penanganan weakness 1a, 1.b</p> <p>- Penguatan opportunity 1b</p>

6. KPPBC TMP C Ambon :

Strength	Weakness
<p>1. Man :</p> <p>a. Pegawai KPPBC TMP C Ambon di dominasi oleh pegawai millenial yang memiliki semangat, kinerja, dan integritas yang baik;</p> <p>b. Karena sebagian besar jajaran pimpinan merupakan promosi maka memiliki semangat dan komitmen yang sangat baik terhadap kinerja dan integritas.</p> <p>2. Money : Terdapat dukungan anggaran pada DIPA.</p> <p>3. Machine :</p> <p>a. Peralatan kerja terutama</p>	<p>1. Man :</p> <p>a. Pegawai KPPBC TMP C Ambon didominasi pegawai millenial yang masih belum berpengalaman;</p> <p>b. Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat atau pelatihan teknis yang memadai untuk mendukung rencana strategis di bidang kepabeanaan dan cukai.</p> <p>2. Money : Alokasi per kegiatan belum sesuai dengan yang</p>

<p>perangkat komputer sebagai alat utama pelaksanaan pekerjaan telah ada;</p> <p>b. CCTV sudah terpasang di area kantor.</p> <p>4. Method :</p> <p>a. Terdapat berbagai peraturan dan panduan tugas pegawai seperti PMK, KMK, Perdirjen, SE, SOP, dll;</p> <p>b. Form 3E dan 3F melalui Sistem Perijinan online E-Manise;</p> <p>c. Pelayanan kepada pengguna jasa melalui SIPERI (Sistem Perijinan <i>Online</i>) terkait perijinan antara lain bongkar timbun di luar kawasan pabean, <i>redress</i> manifes dll.</p> <p>5. Information :</p> <p>Telah disusun database calon eksportir di wilayah Kota Ambon, Buru dan Seram.</p> <p>6. System :</p> <p>a. Telah ada sistem pendukung kinerja pegawai seperti CEHRIS, CEISA yang berlaku secara nasional;</p> <p>b. Bea Cukai Ambon mempunyai beberapa aplikasi mandiri yang mendukung kemudahan pelayanan kepada pengguna jasa.</p>	<p>direncanakan.</p> <p>3. Machine :</p> <p>a. Jaringan internet dan LAN tidak lancar;</p> <p>b. Kondisi Kapal Patroli 1511 dan sarana pendukungnya tidak memadai;</p> <p>c. Kendaraan Dinas operasional out of date;</p> <p>d. <i>Software</i> peralatan komputer belum original ;</p> <p>e. Alat pendeteksi NPP tidak ada;</p> <p>f. Alat <i>x-ray</i> kabin tidak ada.</p> <p>4. Method :</p> <p>-</p> <p>5. Information :</p> <p>Belum adanya database untuk pengawasan peredaran barang kena cukai</p>
<p>Opportunity</p> <p>1. Market/ Stakeholder : Permintaan kebutuhan komoditi perikanan</p> <p>2. Domestik : Potensi ekspor di sektor perikanan dan perkebunan masih sangat besar.</p> <p>3. National : Adanya rencana implementasi kebijakan NLE (<i>National Logistic Ecosystem</i>).</p> <p>4. International :</p>	<p>Threat</p> <p>1. Market/ Stakeholder : Belum adanya ekspor <i>direct call</i> dari Ambon.</p> <p>2. Domestik :</p> <p>a. Pola pikir masyarakat yang cenderung merasa nyaman dengan transaksi penjualan local;</p> <p>b. Cara perlakuan komoditi ekspor yang tidak sesuai standar ekspor yang menurunkan harga (dalam</p>

<p>Perpanjangan tarif preferensi dari pemerintah USA.</p>	<p>hal ini : Pala, cengkeh); c. Kondisi geografis berupa kepulauan dan daratan yang sulit dijangkau. 3. National : Biaya transportasi mahal. 4. International: Pandemi Covid-19, negara tujuan ekspor <i>lockdown</i>.</p>
---	---

Strategi KPPBC TMP C Ambon :

No	Strategi	Program	Hubungan dengan SWOT
1	Tujuan Perlindungan Masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif		
1.1	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor;	a. Pengumpulan data b. Koordinasi dengan instansi, lembaga, calon eksportir	- Penguatan Strength 4a, 4b, 4c, - Penguatan Opportunity 1, 3, 4 - Penanganan Weakness 5 - Antisipasi Threat 1, 2a, 2b, 3, 4
1.2	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);	a. Pendataan dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana alat deteksi NPP dan X-ray kabin b. Pelatihan untuk pengoperasian alat c. Koordinasi dengan BNN Propinsi, Kepolisian	- Penanganan Weakness 3e, 3f
1.3	Pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	a. Perbaikan Kapal Patroli b. Pengajuan pengadaan mobil operasional c. Pengajuan pengadaan sarana komunikasi dan informasi untuk menunjang pengawasan	- Penguatan Strength 1a, 1b - Penanganan Weakness 3b, 3c - Antisipasi Threat 2c
2	Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal		
	-	-	-
3	Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien		

3.1	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi ke masyarakat terkait ekspor b. Melakukan asistensi dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk melakukan kegiatan ekspor (eksportir baru). c. Sinergitas stakeholder pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam menuju/menciptakan biaya logistik yang efisien bagi ekportir dan/atau importir d. Bekerja sama dengan Pemprov/Pemda/Instansi terkait dalam mengedukasi masyarakat terkait penanganan barang/produk tujuan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Opportunity 2 - Antisipasi Threat 2a, 2b
3.2	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana <i>new normal</i> pasca <i>Covid-19</i> di lingkungan DJBC	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap Desain sarana dan prasarana b. Usulan kebutuhan sarpras c. Pelaksanaan redesain ruang kerja dan pengadaan sarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 3a, 3b, 4b, 4c, 6a, 6b - Penanganan Weakness 3a,3d
3.3	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	<p>Peningkatan kompetensi pegawai melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi b. Mengusulkan calon peserta diklat ke sekretariat c. Pelaksanaan pelatihan secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 1a, 1b - Penanganan Weakness 1a, 1b
3.4	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign penganggaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan RKA K/L b. Monev realisasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Strength 2 - Penanganan Weakness 2

7. KPPBC TMP C Tual :

Strength	Weakness
-----------------	-----------------

<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jajaran pimpinan dan pegawai telah berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi melalui pencanangan ZI menuju kantor WBK/WBBM.;b. Sebagiaian besar pegawai KPPBC TMP C Tual adalah pegawai yang masih baru/muda dengan semangat yg kuat untuk belajar dan menjalankan tugas di semua bidang. <p>2. Money :</p> <p>Terdapat dukungan anggaran pada DIPA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan serta operasional perkantoran.</p> <p>3. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sudah terdapat Pos Pengawasan KPPBC TMP C Tual di Saumlaki dan Kantor Bantu KPPBC TMP C Tual di Dobo sebagai tempat pengawasan dan pelayanan;b. Sarana prasarna yang sudah memadai berupa peralatan kerja seperti perangkat komputer, kendaraan operasional serta CCTV sebagai alat control pegawai. <p>4. Methode :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terdapat berbagai peraturan dan panduan tugas pegawai seperti PMK, KMK, Perdirjen, SE, SOP. dll;b. Penguatan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan seperti <i>sharing session</i>, Paspan (program <i>sharing</i> pengetahuan) dll;c. Pembinaan mental yang berkesinambungan. <p>5. Information :</p> <p>Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p> <p>6. System :</p>	<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sebagian besar pegawai adalah pegawai baru yang belum mempunyai banyak kompetensi teknis maupun pengalaman;b. Jumlah pegawai masih kurang khususnya untuk mengisi pos pos yang menjadi wilayah pengawasan Bea Cukai Tual seperti di Pulau MOA, Wetar dan Liran. <p>2. Money :</p> <p>-</p> <p>3. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sarana prasana kantor masih belum lengkap seperti sarana ibadah, ruang konsultasi, dan masih menyewa ruko untuk kantor;b. Kelengkapan sarana transportasi di Pos Bantu dan Pos Pengawasan masih kurang;c. Jaringan internet di Kantor Pos Bantu belum ada. <p>4. Methode :</p> <p>Layanan CK-5 dan CK-6 yang masih belum <i>online</i>.</p> <p>5. Information :</p> <p>Belum adanya <i>database</i> eksportir dan importir yang lengkap.</p> <p>6. System :</p> <p>Aplikasi pelayanan <i>yacht</i> masih sering bermasalah (<i>error</i>).</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dibangun aplikasi pengawasan pemetaan BKC (JEDI) untuk memetakan potensi kerawanan BKC dan data pemetaan penyebaran BKC HT di semua wilayah KPPBC Tual; b. Telah dibangun aplikasi “lapor BC Tual” sebagai sarana kemudahan dalam kegiatan ekspor langsung melalui Tual. 	
<p>Opotunity</p> <p>1. Market/ Stakeholder :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proyek pembangunan blok Masela memasuki masa konstruksi pada tahun 2022; b. Adanya beberapa perusahaan yang potensial untuk melakukan ekspor. <p>2. Domestic :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemda memiliki program penggalan potensi ekspor daerah; b. Penunjukan pelabuhan PPN Tual dan Saumlaki sebagai LIN; c. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tidak menjual BKC illegal. <p>3. National :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instansi terkait memiliki program untuk peningkatan ekspor; b. Adanya subsidi DID untuk daerah yang melakukan ekspor; c. Adanya sinergi pengawasan bersama dalam bentuk operasi atau patroli bersama. <p>4. International :</p> <p>-</p> <p>5. Lain-lain</p> <p>-</p>	<p>Threat</p> <p>1. Market/ Stakeholder :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kesehatan serta ketersediaan kebutuhan hidup di Liran yang masih sulit dipenuhi dari dalam negeri; b. Adanya konflik dengan masyarakat MBD apabila dilakukan penindakan kegiatan lintas batas di Liran. <p>2. Domestic :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perijinan ekspor masih sulit; b. Sarana transportasi untuk melakukan ekspor masih belum efisien; c. Sarana transportasi domestic yang kurang memadai untuk menjangkau wilayah pengawasan KPPBC TMP C Tual. <p>3. National : -</p> <p>4. International :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum pulihnya situasi di Hongkong sebagai salah satu Negara tujuan ekspor yang mengakibatkan permintaan ekspor kerapu hidup menurun; b. Menurunnya permintaan ekspor ikan

	ke China akibat <i>Covid-19</i> .
--	-----------------------------------

Strategi KPPBC Tual :

No	Strategi	Program	Hubungan dengan SWOT
1	Tujuan Perlindungan Masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif		
1.1	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP), melalui:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan perdagangan barang-barang illegal di perbatasan Timor Leste; b. Sosialisasi ke masyarakat perbatasan; c. Pengembangan system pengawasan melalui pengembangan aplikasi JEDI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Threat 1a - Penguatan Strength 6a
1.2	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di provinsi Maluku dan Maluku Utara	Pelayanan importasi dengan fasilitas fiskal untuk pertambangan gas bumi Blok Masela	Penguatan Oportunity 1.a
2	Penerimaan negara yang optimal		
2.1	Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi implementasi pelayanan CK 5 dan CK 6 secara <i>online</i>; b. Perbaikan dan pengembangan aplikasi pelayanan <i>yacht</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Opportunity 1.a - Penanganan Weakness 4 - Penanganan Weakness 6
2.2	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya koordinasi dengan kontraktor blok Masela; b. Penyiapan kantor untuk pelayanan dan pengawasan kepabeanan di Saumlaki; c. Sosialisasi dan pendampingan kepada calon eksportir potensial; d. Sinkronisasi datan percepatan pelayanan ekspor melalui perbaikan dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Opportunity 2.a-b dan 3. a-b - Penguatan Strength 6.b

		aplikasi LAPOR BC TUAL.	
3	Birokrasi dan layanan public yang <i>agile</i> , efektif dan efisien		
3.1	Penguatan Budaya Pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, modern, dinamis dan lincah	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai	Penguatan Strength 4.b-c
3.2	Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis	<i>Rolling</i> penempatan pegawai untuk penyegaran dan menambah pengetahuan dan pengalaman tugas	
3.3	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign anggaran	a. Perencanaan anggaran yang berkualitas berbasis <i>output</i> dan mendukung sasaran kinerja b. Perencanaan pemanfaatan anggaran yang lebih realistis dan monitoring rutin perbulan.	Penguatan Strength 2

8. KPPBC TMP C Ternate :

STRENGTH	WEAKNESS
<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kombinasi pegawai senior dan junior yang mendukung pelaksanaan tugas; b. Mayoritas pejabat pimpinan hasil promosi dengan reputasi yang baik; c. Pegawai yang berpengalaman dalam bidang multimedia, desain grafis, kawasan berikat, pengawasan. <p>2. Money : DIPA yang mendukung tugas dan fungsi.</p> <p>3. Machine :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur organisasi yg memadai sesuai fungsi pelayanan dan pengawasan; b. Peralatan kerja secara umum cukup memadai (Ex. Gedung kantor, kendaraan, rumah dinas). <p>4. Method :</p>	<p>1. Man :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat beberapa pegawai KPPBC TMP C Ternate yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang tujuan organisasi; b. Masih belum optimalnya pembagian tugas dan fungsi antara pejabat pengawas dan pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai; c. Pegawai yunior yag masih perlu bimbingan dan pengalaman; d. Kurang mendukungnya sarana dan prasarana untuk peningkatan ekspor langsung dari Maluku Utara. Ex. Inefisiensi biaya dan kinerja logistik, kontinuitas dan kualitas produk, dukungan investasi. <p>2. Money</p> <p>3. Machine :</p>

<p>a. Tersedianya peraturan pelaksanaan tugas untuk menunjang efektivitas dan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas;</p> <p>b. Koordinasi internal yang kuat dari pimpinan ke unit kerja dan antar unit kerja;</p> <p>c. Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Kantor Pusat DJBC untuk mendapatkan arahan dan bimbingan;</p> <p>d. Sinergi dengan instansi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah Maluku Utara;</p> <p>e. Hubungan baik yang sesuai peraturan dan etika profesionalisme dengan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta pemangku kepentingan lainnya (APH).</p> <p>5. Information : Data dan informasi terkait pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai telah didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6. System : Telah ada sistem pendukung kinerja pegawai seperti CEHRIS, CEISA yang berlaku secara nasional, dan beberapa aplikasi lokal seperti Salero dan NPPBKC Online untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.</p>	<p>a. Kurangnya peralatan yang mendukung untuk kegiatan publikasi.</p> <p>b. Tidak terdapat CCTV dan <i>Monitoring Control Room</i> (MCR) untuk menunjang pengawasan kepabeanan dan cukai di kawasan pabean.</p> <p>4. Method :</p> <p>a. Belum adanya model pengawasan yang efektif untuk wilayah kepulauan seperti Maluku Utara;</p> <p>b. Banyaknya jumlah dokumen PIB dan minimnya pejabat pemeriksa dokumen, terutama untuk PIB yang menggunakan fasilitas. Ex. Tarif preferensi.</p> <p>5. Information :</p> <p>a. Sarana pengumpulan informasi yang belum maksimal khususnya informasi terkait pelanggaran kepabeanan dan cukai oleh masyarakat;</p> <p>b. Pengolahan informasi yang belum maksimal.</p> <p>6. System Tidak adanya <i>database</i> untuk <i>profiling</i> stakeholder seperti agen pelayaran, PPJK, importir, eksportir, dan calon eksportir potensial.</p>
<p>OPPORTUNITY</p> <p>1. Market/Stakeholder :</p> <p>a. Adanya keinginan agen pelayaran domestik dan instansi terkait untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan ekspor langsung dari Maluku Utara;</p> <p>b. Adanya komitmen pengguna jasa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai;</p> <p>c. Adanya semangat UKM agar</p>	<p>THREAT</p> <p>1. Market/Stakeholder :</p> <p>a. Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari kepulauan;</p> <p>b. Kurangnya dukungan untuk peningkatan ekspor. Ex. Orientasi pelaku usaha, instansi terkait, kondisi alam, lemahnya teknologi budidaya, kondisi pandemi dll.</p> <p>2. Domestik</p>

<p>lebih produktif untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan cukai khususnya dalam hal kemudahan ekspor.</p> <p>2. Domestik</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bea Cukai sebagai motor penggerak untuk ekspor langsung dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;b. Luas dan kuatnya jaringan informasi untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran NPP melalui <i>e-commerce</i>;c. Adanya inisiatif bersama dengan perwakilan Kemenkeu dan Pemda Malut dapat dijadikan media untuk lebih giat mendorong ekspor (Ex. Rumah Umi, GOSORA). <p>3. Nasional</p> <ul style="list-style-type: none">a. Wilayah Maluku Utara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi untuk menarik investor dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional;b. Usulan untuk mencapai WBK pada tahun 2022 meningkatkan semangat integritas dan tertib administrasi seluruh pegawai dan memperbaiki sarana kantor dan organisasi. <p>4. Internasional</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membangun koordinasi dengan perwakilan RI di berbagai negara dalam rangka promosi produk-produk IKM Maluku Utara;b. Telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai Kawasan pariwisata dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif;c. Pengguna jasa dengan investasi besar dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagai	
---	--

sarana promosi investasi asing yang didukung dengan fasilitas kepabeanan dan cukai.	
---	--

Strategi KPPBC TMP C Ternate :

No	Strategi	Program Kerja	Hubungan Dengan SWOT
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif			
1.1	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di Maluku Utara	a. Bimbingan teknis dan asistensi Kawasan Berikat industri pertambangan untuk mendukung kelancaran proses impor dan mendukung daya saing ekspor produk tambang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalan strength 1a,1b,3a,3b, 4b, dan 4c. - Penguatan Opportunity 1b.
		b. Melakukan asistensi, pemberian edukasi, melakukan <i>customs visit company</i> kepada para pengusaha UMKM khususnya yang berpotensi melakukan ekspor komoditas non tambang secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan weakness 4a - Penguatan opportunity 2b
		c. Melakukan komunikasi dengan atase perdagangan dan atase keuangan pada KJRI/KBRI di beberapa negara yang potensial sebagai tujuan ekspor (Jepang, Hong Kong, India, Tiongkok, Singapura, Saudi Arabia, dll	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalan strength 1a,1b,3a,3b, 4b, dan 4c. - Penguatan Opportunity 1b, 1c, dan 2a. - Penanganan weakness 1d - Antisipasi threat 1b
		d. Asistensi <i>stakeholder</i> yang berhubungan dengan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan weakness 1d - Antisipasi threat 1b - Penguatan opportunity 1a, 3a dan 4a
		e. Asistensi pengembangan KEK	Penguatan opportunity 4b

		Morotai	
1.2	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP)	a. Pembangunan dan pengembangan SDM melalui diklat teknis dan P2KP di bidang pengawasan	Penanganan weakness 1a dan 1c. Pengoptimalan strength 4a.
		b. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan instansi dan Lembaga lain	Pengoptimalan strength 4e.
1.3	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai	Pembuatan model pengawasan efektif di wilayah kepulauan.	Penanganan weakness 4a
1.4	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC illegal	Optimalisasi peran intelijen dan informasi dari masyarakat.	- Penanganan weakness 5a dan 5b. - Antisipasi threat 1a
1.5	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	Pembuatan database profil kepatuhan pengguna jasa yang mencakup data pelanggaran dan capaian	- Penanganan weakness 5a - Penguatan strength 5
		Pembuatan media penjangkaran informasi dari masyarakat terkait pelanggaran kepabeanan dan cukai	
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal			
2.1	Penerimaan negara yang Optimal	Membentuk tim <i>Quality Assurance</i> (QA) dalam rangka penjaminan atas pelaksanaan penelitian/pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor telah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terdapat lost potential atas penerimaan baik bea masuk maupun bea keluar	Penanganan weakness 4b
2.2	Penguatan kerja sama/ sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga serta Aparat	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal teknis terkait, unsur pimpinan	- Penguatan opportunity 2c - Pengoptimalan

	Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara	daerah dan dinas terkait pada Pemerintah Daerah, dan pihak pengelola/administrator kepelabuhan, seraf Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara secara intensif guna mendukung peningkatan ekspor komoditas non tambang;	strength 4d
2.3	Penguatan Joint Program	Optimalisasi <i>Joint Program</i> dengan DJP	Pengoptimalan strength 4d
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien			
3.1	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi	Pengembangan Zona Integritas di KPPBC Ternate untuk meraih predikat WBK/WBBM	Penguatan opportunity 3b
		Internalisasi yang terkait peralihan jabatan struktural ke fungsional	- Penanganan weakness 1b. - Penguatan strength 1b
3.2	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional	Optimalisasi <i>production studio</i> dan <i>content creative</i> untuk tujuan publikasi	- Menguatkan strength 1c - Penanganan weakness 3a